BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Penyusunan Prioritas dan Sasaran pembangunan daerah pada RKPD tahun 2016 dirumuskan dalam rangka untuk mencapai target janji dan visi Misi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta tahun 2013 - 2017. Selain itu dokumen ini juga mencakup kebijakan untuk mendukung prioritas pembangunan nasional. Secara sistematis dan terstruktur maka selanjutnya untuk teknis penyajian dilakukan dalam bentuk program dan kegiatan.

Penyusunan BAB ini dilakukan dengan memperhatikan hasil evaluasi kinerja daerah, proyeksi kerangka ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya. Substansi dokumen RKPD tahun 2016 mendasarkan dan memperhatikan:

1. Arah Kebijakan Pemerintah Pusat yang dijabarkan dalam 9 prioritas pembangunan nasional (Nawa Cita) sebagaimana yang tercantum pada Rencana Kerja Pemerintah tahun 2016.
2. Arah kebijakan RPJMD DKI Jakarta tahun 2013 – 2017 guna tercapainya visi dan misi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana ditetapkan dalam arah kebijakan tahun 2016.
3. Konsistensi antara kebijakan pusat dan Provinsi DKI Jakarta sebagai upaya penyelesaian target - target pembangunan nasional maupun provinsi.
4. Solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat DKI Jakarta yang sifatnya mendesak dan memerlukan penanganan segera pada tahun 2016.

Prioritas pembangunan daerah yang telah tersusun ini akan menjadi acuan dan pedoman bagi seluruh SKPD dan UKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menjabarkan program dan kegiatan tahun 2016. Selain itu prioritas pembangunan daerah dimaksudkan juga untuk menjaga percepatan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional.

Selain itu, Penyusunan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2016 juga diarahkan untuk menjamin terwujudnya visi dan misi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013 - 2017. Selanjutnya, penentuan prioritas dan sasaran pembangunan DKI Jakarta tahun 2016 juga diarahkan untuk mendukung terwujudnya prioritas pembangunan nasional yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2016.

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.1.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional

Tujuan pembangunan pada dasarnya harus selaras dengan tujuan nasional, sebagaimana disebutkan dalam pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Esensi dasar inilah yang dijadikan dasar dalam merencanakan pembangunan, baik pembangunan dalam skala nasional maupun skala daerah.

Strategi Pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2015-2019 dalam upaya melaksanakan Agenda Pembangunan Nasional untuk memenuhi 9 agenda Prioritas (Nawa Cita), yaitu:

Cita 1 : Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;

Cita 2 : Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;

Cita 3 : membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan

Cita 4 : Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;

Cita 5 : Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;

Cita 6 : Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional;

Cita 7 : Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;

Cita 8 : Melakukan revolusi karakter bangsa; dan

Cita 9 : Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Selanjutnya keterkaitan antara dimensi pembangunan dengan Nawa Cita dapat dijelaskan oleh Gambar 4.1 berikut:

Gambar 4.1 Strategi Pembangunan Nasional

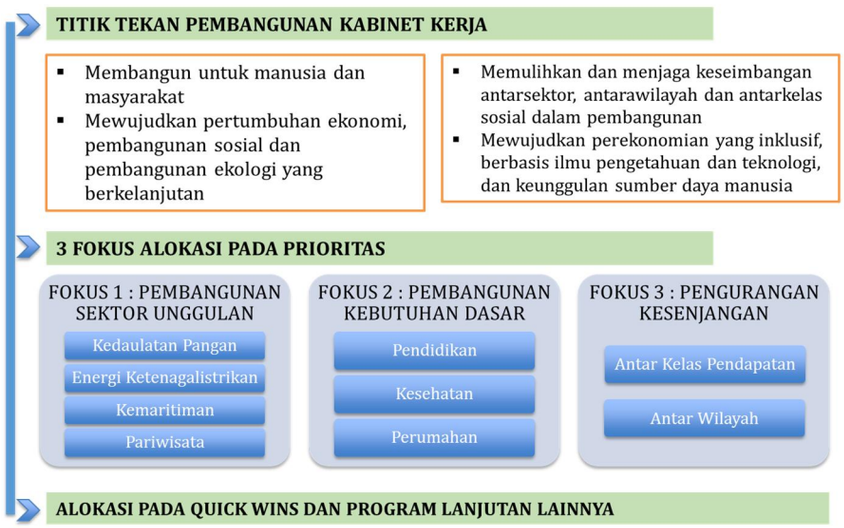

Sumber: paparan Rakorbangpus RPJMN 2015 -2019 Bappenas

Selanjutnya sembilan-cita-cita (Nawa Cita) dijabarkan dalam strategi pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2015-2019 yang terdiri dari empat bagian utama yakni: (1) norma pembangunan; (2) tiga dimensi pembangunan; (3) kondisi perlu agar pembangunan dapat berlangsung; serta (4) program-program *quick wins*. Tiga dimensi pembangunan dan kondisi perlu dari strategi pembangunan memuat sektor-sektor yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan RPJMN 2015 - 2019 yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah 2016.

4.1.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016

Tujuan dan Sasaran pembangunan Provinsi DKI Jakarta yang telah tersusun diterjemahkan dalam bentuk program unggulan dan prioritas daerah yang akan menjadi acuan dan pedoman bagi seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menjabarkan program dan kegiatan tahun 2016. Selain itu prioritas pembangunan daerah dimaksudkan juga untuk menjaga percepatan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional.

Tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana tercantum pada dokumen ini merupakan penjabaran dari dokumen RPJMD yang telah disusun. Selanjutnya tujuan merupakan suatu kondisi ideal yang ingin dicapai pada akhir periode dimana upaya pencapaiannya dilakukan dengan memenuhi sasaran – sasaran yang telah ditentukan. Guna tercapainya sasaran pembangunan yang efektif dan efisien, tentunya harus didukung oleh strategi pembangunan yang ideal dan tepat sasaran. Ketiga hal tersebut nantinya akan menjadi acuan penyusunan program unggulan dan prioritas daerah provinsi DKI Jakarta di tahun 2016.

Tujuan, sasaran dan strategi pembangunan merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun

urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi, untuk mewujudkan visi pembangunan daerah Tahun 2013-2017

Tujuan dan sasaran disusun dalam kerangka yang jelas di setiap misi, yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

A. Misi 1: Mewujudkan Jakarta sebagai kota modern yang tertata rapi serta konsisten dengan Rencana Tata Ruang Wilayah

a. Tujuan 1: Mengembangkan produk ekonomi dan bisnis kota Jakarta sesuai dengan potensi dan ciri khasnya yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.

b. Tujuan 2: Mewujudkan penataan ruang kota yang terpadu dan berkelanjutan.

Bahwa untuk misi kesatu, pada kalimat "Jakarta kota modern yang tertata rapi", pada hakikatnya merupakan pelaksanaan pilar ekonomi dalam pengembangan perekonomian kota yang difokuskan pada penataan ruang ekonomi, infrastruktur ekonomi dan sistem distribusi logistik yang pada gilirannya akan mendukung peningkatan perekonomian kota.

Dalam era globalisasi dan teknologi informasi yang berkembang dengan pesat, pemerintah kota tidak dapat menghindar dari persaingan antar kota-kota secara global. Begitu pula, Kota Jakarta sebagai Ibukota NKRI tidak saja menjadi barometer keberhasilan pembangunan bagi kota-kota di Indonesia, namun harus mampu bersaing dengan kota-kota lain di dunia. Sedikitnya kota Jakarta harus berorientasi pada kota pintar *(smart city)* yang memperhatikan tiga hal penting untuk meningkatkan daya saing kota, yaitu: perkembangan perekonomian kota yang dapat dilihat dari kegiatan jasa-perdagangan dan arus investasi, pembangunan kota yang memperhatikan isu keberlanjutan lingkungan dan kehidupan sosial kemasyarakatan yang kondusif, serta penggunaan energi yang bijaksana dan ramah lingkungan.

Pengembangan kota Jakarta sebagai kota modern dilaksanakan berdasarkan potensi sumberdaya manusia dan ciri khas yang dimilikinya. Membangun kota Jakarta dengan potensi ekonomi dan bisnis yang dimilikinya dilakukan dengan memperhatikan positioning kota, differensiasi dan branding atas produk-produk yang dimiliki kota Jakarta. Selain itu pembangunan kota Jakarta harus memperhatikan keberlanjutan di masa depan melalui perwujudan tata ruang kota yang rapi dan konsisten.

Selanjutnya dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2030, maka salah satu langkah strategis yang akan terus dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah mengoptimalisasikan dan mengoperasionalisasikan pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan ruang kota yang berkualitas. Oleh karena itu, untuk mewujudkan hal tersebut terus peningkatan kualitas kelembagaan, sumber daya manusia, dan tata laksana dengan mempertimbangkan keseimbangan antara ketersediaan infrastruktur dan pengembangan kawasan. Tentu dalam pelaksanaannya diperlukan

konsistensi dan komitmen dalam penegakan hokum sehingga sinergitas antara pemerintah, masyarakat dengan komunitas pemerhati penataan ruang yang didukung oleh transparansi informasi terkait penataan ruang menjadi hal mutlak. Dengan demikian, dapat tercipta pengembangan produk ekonomi dan bisnis kota Jakarta sesuai dengan potensi dan ciri khas yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai demi terwujudnya penataan ruang kota yang terpadu dan berkelanjutan.

Guna mewujudkan mewujudkan kedua tujuan dari misi 1 tersebut, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah:

- Berkembangnya aktivitas ekonomi perdagangan dan jasa pada Pusat Kegiatan Primer dan Sekunder terutama yang ditetapkan dalam RTRW.
- Berkembangnya kawasan-kawasan *Transit Oriented Development (TOD)* yang memadukan berbagai fungsi dan sarana kota dengan mudah
- Tersedianya ruang untuk ekonomi informal pada kawasan perkantoran dan perniagaan kota
- Meningkatnya investasi ekonomi kota yang mendorong penciptaan lapangan kerja dan tumbuhnya kelembagaan ekonomi lokal
- Tersedianya stok dan distribusi pangan untuk mendukung aktivitas ekonomi kota
- Tersedianya fasilitas internet secara merata di ruang public
- Tersedianya infrastruktur energi dan kelistrikan untuk mendukung pembangunan kota
- Tersedianya rencana tata ruang kota yang berkualitas dan memperhatikan aspirasi pemangku kepentingan
- Terlaksananya pengendalian pemanfaatan ruang kota yang konsisten.

Selanjutnya penjabaran sasaran pada misi 1 sebagaimana diamanatkan RPJMD DKI Jakarta tahun 2013 – 2017 terlihat pada Tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1. penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan pada misi 1 ke dalam strategi pembangunan daerah

MISI I :
Mewujudkan Jakarta sebagai kota modern yang tertata rapi serta konsisten dengan Rencana Tata Ruang Wilayah

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
1. Mengembangkan produk ekonomi dan bisnis kota Jakarta sesuai dengan potensi dan ciri khasnya yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. **2. Mewujudkan penataan ruang kota yang terpadu dan berkelanjutan.**	1. Berkembangnya aktivitas ekonomi perdagangan dan jasa pada Pusat Kegiatan Primer dan Sekunder terutama yang ditetapkan dalam RTRW. 2. Berkembangnya kawasan-kawasan Transit Oriented Development (TOD) yang memadukan berbagai fungsi dan sarana kota dengan mudah 3. Tersedianya ruang untuk ekonomi informal pada kawasan perkantoran dan	1. Peningkatan dan pemantapan fungsi Pusat Kegiatan Primer dan Sekunder 2. Pengembangan baru Pusat Kegiatan Primer dan Sekunder secara hirarkis 3. Pengembangan Transit Oriented Development (TOD) pada jalur sepanjang sistem angkutan massal 4. Penyediaan ruang bagi sektor informal pada

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
	perniagaan kota 4. Meningkatnya investasi ekonomi kota yang mendorong penciptaan lapangan kerja dan tumbuhnya kelembagaan ekonomi local 5. Tersedianya stok dan distribusi pangan untuk mendukung aktivitas ekonomi kota 6. Tersedianya fasilitas internet secara merata di ruang public 7. Tersedianya infrastruktur energi dan kelistrikan untuk mendukung pembangunan kota 8. Tersedianya rencana tata ruang kota yang berkualitas dan memperhatikan aspirasi pemangku kepentingan 9. Terlaksananya pengendalian pemanfaatan ruang kota yang konsisten	kawasan perkantoran dan perdagangan 5. Pembangunan mall khusus bagi pedagang kaki lima (PKL) 6. Revitalisasi pasar tradisional dengan tidak menggusur PKL 7. Pengembangan kelembagaan koperasi dan UKM untuk mendukung formalisasi dari ekonomi informal 8. Optimalisasi distribusi komoditas dan kebutuhan pokok menghadapi ketatnya persaingan pasar 9. Peningkatan fungsi lumbung pangan di tingkat kelurahan secara efektif 10. Pengembangan sistem dan jaringan telekomunikasi pada kantor pemerintahan, pusat pelayanan publik dan tempat umum 11. Pengelolaan energi ramah lingkungan dan suplai bahan bakar minyak dan gas yang efektif dan efisien 12. Penataan jaringan utilitas perkotaan 13. Peningkatan mekanisme dan peran pemangku kepentingan dalam penataan ruang 14. Pengembangan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang yang efektif 15. Pengembangan sistem informasi spasial

Sumber: RPJMD Provinsi DKI Jakarta tahun 2013 - 2017

B. Misi 2: Menjadikan Jakarta sebagai kota yang bebas dari masalah-masalah menahun seperti macet, banjir, pemukiman kumuh, sampah dan lain-lain

a. Tujuan 1: Menyediakan infrastruktur kota yang handal untuk mengatasi masalah menahun;

b. Tujuan 2: Mendorong pembangunan kota yang berwawasan lingkungan dan berketahanan dalam menghadapi resiko bencana dan dampak perubahan iklim.

Dalam rangka pencapaian misi kedua, pada dasarnya adalah penjabaran pelaksanaan dari sasaran Pilar Lingkungan Hidup yang berarti akan difokuskan pada infrastruktur dan manajemen transportasi, infrastruktur

banjir, peningkatan kualitas rumah rakyat dan infrastruktur pengelolaan sampah dan air.

Meskipun kota Jakarta telah berkembang pesat sebagai pusat perekonomian nasional, namun masih menghadapi berbagai masalah dan ancaman kerusakan lingkungan yang dapat mengancam keberlanjutan pembangunan kota di masa depan. Berbagai masalah menahun yang masih sering terjadi antara lain banjir, kemacetan, permukiman kumuh, dan sampah. Kegagalan mengatasi masalah diatas dapat mengakibatkan penurunan daya saing dan daya tarik kota yang pada akhirnya menurunkan produktivitas kota.

Dari sisi pembenahan system Transportasi, pengembangannya merupakan kebutuhan utama yang perlu diperhatikan dalam pembangunan daerah. Sebagai salah satu kota megapolitan di dunia, Jakarta menghadapi berbagai permasalahan transportasi akibat meningkatnya aktivitas ekonomi, sosial dan budaya. Oleh karena itu, hingga saat ini masih terus diupayakan pengembangan sistem transportasi terpadu untuk memperlancar kegiatan produksi, distribusi barang dan jasa serta peningkatan aksesibilitas bagi manusia ataupun barang dan jasa.

Pengembangan sistem transportasi yang mengutamakan pada sistem angkutan umum massal yang bersinergi dengan angkutan darat, sungai dan udara diharapkan mampu meningkatkan mobilitas penduduk serta barang dan jasa di DKI Jakarta. Selain itu, pengembangan sistem transportasi di DKI Jakarta harus memperhatikan sistem transportasi wilayah yang lebih luas dan untuk memfasilitasi pergerakan orang dan barang dari dan ke wilayah Bodetabek yang juga semakin meningkat.

Selanjutnya dari sisi permasalahan Banjir, rob, dan genangan, kondisi ini merupakan ancaman bencana yang masih dihadapi dan diprioritaskan penanganannya. Bencana tersebut diakibatkan oleh banjir kiriman, hujan lokal, dan kenaikan muka air laut. Penanganannya masing-masing berbeda namun harus menjadi satu kesatuan strategi. Dalam implementasinya, upaya penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pengembangan tata laksana dengan mengefektifkan Pengendalian Banjir yang meliputi perbaikan sistem sungai dan saluran, pintu air, polder, situ dan waduk, proteksi air laut, pengembangan sistem informasi untuk peringatan dini, dan kesiapsiagaan masyarakat masih menjadi prioritas utama. Untuk itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berupaya menjalin sinergitas antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah daerah sekitar dan masyarakat.

Lebih lanjut, Pembangunan DKI Jakarta juga turut memperhatikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dimana hal ini menjadi kriteria utama mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Pembangunan yang berwawasan lingkungan meliputi aspek pengendalian pencemaran lingkungan (persampahan, pengelolaan air limbah dan penanganan polusi udara) serta perlindungan kawasan lindung dan konservasi.

Dari sisi penanganan permasalahan persampahan, kendala yang dihadapi meliputi :

- Tingginya timbunan sampah sehingga menuntut ketersediaan prasarana dan sarana serta biaya manajemen operasional yang tinggi;
- Sulitnya mencari lahan untuk fasilitas pengelolaan sampah (TPS, ITF, TPST) di wilayah Jakarta dikarenakan resistensi masyarakat, serta;
- Kesadaran masyarakat dalam membuang sampah masih rendah sehingga sampah dibuang ke saluran drainase, sungai, jalan dan sebagainya.

Sedangkan langkah - langkah yang hingga saat ini terus diupayakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penanganan sampah di DKI Jakarta antara lain :

- Pemberlakuan kewajiban 3R dan pemilahan sampah di semua sumber sampah;
- Penguatan kelembagaan sampah di tingkat RT/RW dengan meningkatkan peran Lurah dan Camat;
- Penerapan sistem pengangkutan sampah secara terpilah;
- Pemberlakuan jadwal dan titik pengumpulan sampah di sumber (sebelum dibawa ke TPS atau TPST);
- Pemilihan teknologi ITF agar semaksimal mungkin mengakomodasi '*recovery*' sumber daya sampah;
- Pemberlakuan kewajiban bagi produsen untuk mengambil dan mengolah sampah produknya dan kewajiban bagi penjual (toko) untuk menyediakan tempat pengumpulan sampah produk yang dijualnya, serta;
- Pengenaan tarif/retribusi bagi semua penghasil sampah (produsen dan konsumen) berdasarkan jumlah sampah yang dihasilkan/dibuang.

Guna mewujudkan mewujudkan kedua tujuan dari misi 2 tersebut, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah:

- Tersedianya sistem transportasi perkotaan yang terpadu dan memadai untuk melayani pergerakan orang dan barang
- Tersedianya jaringan jalan dan jembatan dengan kualitas yang mantap untuk melayani sirkulasi dari/ke dalam kota
- Tersedianya sistem tata air yang optimal dalam mendukung upaya pengendalian banjir, banjir rob dan dampak perubahan iklim lainnya
- Tersedianya pengelolaan air limbah domestik secara optimal
- Tersedianya sistem penyediaan air minum perpipaan yang melayani semua wilayah kota
- Tersedianya pengelolaan sampah terpadu dan berwawasan lingkungan pada tingkat kota dan kawasan permukiman
- Berkurangnya pencemaran lingkungan (air, tanah dan udara) di wilayah kota Jakarta
- Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dan kelembagaan pemerintah daerah dalam upaya pengurangan resiko bencana dan dampak perubahan iklim

Selanjutnya penjabaran sasaran pada misi 2 sebagaimana diamanatkan RPJMD DKI Jakarta tahun 2013 – 2017 terlihat pada Tabel 4.2 berikut :

Tabel 4.2. penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan pada misi 2 ke dalam strategi pembangunan daerah

MISI II :
Menjadikan Jakarta sebagai kota yang bebas dari masalah-masalah menahun seperti macet, banjir, pemukiman kumuh, sampah dan lain-lain

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
1. Menyediakan infrastruktur kota yang handal untuk mengatasi masalah menahun; **2. Mendorong pembangunan kota yang berwawasan lingkungan dan berketahanan dalam menghadapi resiko bencana dan dampak perubahan iklim.**	1. Tersedianya sistem transportasi perkotaan yang terpadu dan memadai untuk melayani pergerakan orang dan barang 2. Tersedianya jaringan jalan dan jembatan dengan kualitas yang mantap untuk melayani sirkulasi dari/ke dalam kota 3. Tersedianya sistem tata air yang optimal dalam mendukung upaya pengendalian banjir, banjir rob dan dampak perubahan iklim lainnya 4. Tersedianya pengelolaan air limbah domestik secara optimal 5. Tersedianya sistem penyediaan air minum perpipaan yang melayani semua wilayah kota 6. Tersedianya pengelolaan sampah terpadu dan berwawasan lingkungan pada tingkat kota dan kawasan permukiman 7. Berkurangnya pencemaran lingkungan (air, tanah dan udara) di wilayah kota Jakarta 8. Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dan kelembagaan pemerintah daerah dalam upaya pengurangan resiko bencana dan dampak perubahan iklim	1. Pengembangan sarana dan prasarana pendukung sistem transportasi 2. Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal 3. Penataan Angkutan Umum Reguler 4. Pengendalian dan Keselamatan Transportasi 5. Pembangunan Sarana perpindahan moda transportasi yang terintegrasi, aman dan nyaman bagi pejalan kaki dan penyandang disabilitas 6. Penataan sistem perparkiran 7. Pengembangan simpang tak sebidang 8. Pengembangan Prasarana Jalan dan Jembatan 9. Pengembangan sistem tata air yang terpadu 10. Pengembangan sarana dan prasarana sistem drainase 11. Pemeliharaan sarana prasarana drainase 12. Konservasi sumberdaya air 13. Pengendalian banjir akibat air laut pasang 14. Pengembangan pengelolaan air limbah domestik sistem terpusat 15. Pengembangan pengelolaan air limbah domestik sistem setempat 16. Pengembangan sistem air minum perpipaan 17. Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan 18. Penerapan Konsep 3R 19. Pengembangan instrumen pengendalian pencemaran udara 20. Pengembangan instrumen pengendalian pencemaran air 21. Menurunkan beban pencemaran tanah 22. Peningkatan kesiapsiagaan dan kapasitas pemangku kepentingan dalam menghadapi ancaman

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
		bencana 23. Penyediaan sarana dan prasarana penanggulangan bahaya dan ancaman bencana

Sumber: RPJMD Provinsi DKI Jakarta tahun 2013 - 2017

C. Misi 3:

Menjamin ketersediaan hunian dan ruang publik yang layak serta terjangkau bagi warga kota

a. Tujuan 1: Menyediakan hunian dan ruang publik yang layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.

Bahwa untuk misi ketiga, pada hakikatnya merupakan pelaksanaan dari sasaran Pilar Sosial yang akan difokuskan pada peningkatan infrastruktur perumahan rakyat yang dilengkapi dengan fasilitas sosial lainnya dan peningkatan ruang publik berupa taman, taman interaktif dan hutan kota.

Pemenuhan hunian dan ruang publik yang layak merupakan kebutuhan dasar yang harus tersedia dan dapat dijangkau oleh semua warga kota. Ketersediaan hunian dan lingkungan permukiman yang baik merupakan prasyarat penting dalam membangun sumberdaya manusia yang berkualitas. Masalah utama dalam penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau bagi warga masyarakat di Jakarta adalah keterbatasan lahan, sehingga penyediaannya belum dapat sesuai dengan kebutuhannya. Disamping itu, kemauan masyarakat untuk tinggal di rumah susun juga masih rendah.

Upaya peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman kota terus dilakukan secara sistematis dengan menerapkan prinsip-prinsip revitalisasi dalam bentuk perbaikan lingkungan maupun pembangunan kembali. Pemenuhan kebutuhan akan rumah akan tetap diupayakan melalui pembangunan rumah secara vertikal baik pada kawasan baru maupun pada kawasan kumuh yang disesuaikan dengan daya dukung lingkungan setempat. Pengembangan pada kawasan kumuh jug diupayakan melalui peningkatan kualitas huniannya serta prasarana sarana lingkungannya. Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan terus melakukan peningkatan kualitas kelembagaan, sumber daya manusia, dan tata laksana dengan mempertimbangkan sistem informasi dan teknologi serta penegakan hukum, serta menerapkan prinsip-prinsip *urban management*.

Peningkatan kualitas hunian tentunya perlu ditunjang dengan peningkatan ruang publik yang layak melalui program peningkatan kualitas dan kuantitas RTH demi tercapainya kesejahteraan masyarakat yang hakiki. Peningkatan kualitas dan kuantitas RTH akan tetap diprioritaskan pada pembangunan taman kota, taman interaktif dan hutan kota dengan tetap mengacu RTRW 2030 sehingga tercipta konsistensi pembangunan.

Lebih lanjut, peningkatan kualitas dan kuantitas RTH terus didorong melalui upaya penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pengembangan tata laksana dengan mengedepankan aspek monitoring dan evaluasi serta penegakan hukum dengan memanfaatkan teknologi informasi yang handal.

Pada akhirnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan terus mengembangkan skema-skema penyediaan rumah yang layak dan terjangkau serta ruang publik yang memadai baik dengan dukungan program dan kegiatan daerah maupun kerjasama dengan pemerintah pusat dan Swasta melalui Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau *corporate social responsibility* (CSR).

Guna menyediakan hunian dan ruang publik yang layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah:

- Tersedianya rumah layak dan terjangkau untuk semua kelompok masyarakat;
- Tertatanya kawasan permukiman yang layak bagi masyarakat (perbaikan Kampung);
- Meningkatnya luasan dan kualitas ruang terbuka hijau publik dan privat di Jakarta.

Selanjutnya penjabaran sasaran pada misi 3 sebagaimana diamanatkan RPJMD DKI Jakarta tahun 2013 – 2017 terlihat pada Tabel 4.2 berikut :

Tabel 4.3. penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan pada misi 3 ke dalam strategi pembangunan daerah

MISI III :
Menjamin ketersediaan hunian dan ruang publik yang layak serta terjangkau bagi warga kota

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
1. Menyediakan hunian dan ruang publik yang layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.	1. Tersedianya rumah layak dan terjangkau untuk semua kelompok masyarakat 2. Tertatanya kawasan permukiman yang layak bagi masyarakat (perbaikan Kampung) 3. Meningkatnya luasan dan kualitas ruang terbuka hijau publik dan privat di Jakarta	1. Kerjasama dalam penyediaan rumah susun sewa 2. Pengembangan rumah susun sewa 3. Pengembangan rusunami dan apartemen bersubsidi 4. Rehabilitasi dan perbaikan rumah susun sewa yang dikelola Pemprov DKI Jakarta 5. Penataan kawasan permukiman kumuh skala kota 6. Peningkatan ruang terbuka hijau publik dan privat 7. Peningkatan kualitas taman sebagai ruang publik

Sumber: RPJMD Provinsi DKI Jakarta tahun 2013 - 2017

D. Misi 4 :

Membangun budaya masyarakat perkotaan yang toleran, tetapi juga sekaligus memiliki kesadaran dalam memelihara kota

a. Tujuan 1 : Mengembangkan budaya kota yang multikultur dan berbasis potensi lokal

b. Tujuan 2 : Menjadikan masyarakat DKI Jakarta yang sejahtera, berakhlak mulia, disiplin dan partisipatif dalam memelihara kota.

Bahwa untuk misi keempat, pada hakikatnya juga merupakan pelaksanaan dari sasaran Pilar Sosial yang akan difokuskan pada peningkatan kesadaran kehidupan berbudaya dan pendidikan bagi warga kota, peningkatan kualitas masyarakat yang disiplin, ramah, harmonis dalam kemajemukan, sadar lingkungan, partisipatif dan bertanggung jawab dalam menjaga dan memelihara kota. Selain itu juga difokuskan pada pengembangan infrastruktur kebudayaan untuk meningkatkan identitas budaya kota Jakarta seperti penyelenggaraan event budaya bertaraf internasional, revitalisasi kota tua dan kawasan budaya, serta pengembangan area-area untuk penyaluran kreativitas seni dan budaya masyarakat. Karakter budaya betawi juga terus diperkuat melalui penerapan dalam arsitektur bangunan dan karakter kota, pengembangan pusat-pusat dan kawasan budaya betawi.

Kota Jakarta selain mempunyai fungsi sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia juga mempunyai fungsi sebagai pusat pemerintahan, pusat perekonomian, dan pusat kegiatan politik, sosial dan budaya. Dengan fungsinya yang beragam, kota Jakarta menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat dari luar untuk datang mencari pekerjaan dan tinggal di Jakarta, sehingga pertambahan penduduk kota Jakarta akibat migrasi terus meningkat. Banyaknya penduduk yang datang dari berbagai latar belakang suku dan budaya menjadikan Kota Jakarta menjadi kota dengan multi etnis dan budaya. Di sisi lain para pendatang dengan tingkat pendidikan dan keterampilan terbatas akan menimbulkan masalah perkotaan seperti terjadinya konflik sosial, penyandang masalah kesejahteraan sosial, pola konsumsi yang tinggi, ketidakdisiplinan masyarakat,serta menambah tingginya persaingan antar individu.

Lebih lanjut, kondisi tersebut harus disikapi dengan mewujudkan kehidupan masyarakat Jakarta yang harmonis dalam keragaman budaya, agama, suku dan ras. Sejalan dengan berkembangnya kehidupan masyarakat Jakarta yang semakin modern, budaya Betawi harus tetap dipelihara dan dikembangkan dengan mengaplikasikannya ke dalam berbagai aspek kehidupan termasuk dalam pembangunan arsitektur kota.

Selain itu, pemberdayaan kelompok-kelompok dan organisasi kemasyarakatan dalam kegiatan yang bernilai positif menjadi salah satu solusi yang ditempuh oleh Pemerintah DKI Jakarta untuk menyelesaikan konflik sosial yang terjadi. Namun demikian konflik yang terjadi belum sepenuhnya dapat dihilangkan karena masih ada konflik yang terjadi akibat permasalahan yang lebih kompleks yaitu kemiskinan atau tingkat kesejahteraan masyarakat.

Salah satu upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah melalui upaya peningkatan daya saing wilayah, pembangunan Provinsi DKI Jakarta akan diarahkan untuk mengedepankan pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas melalui pemenuhan

kebutuhan dasar, pemberdayaan masyarakat dan perkuatan daya saing wilayah yang di dukung oleh kondisi yang aman dan damai, persebaran penduduk yang merata serta pemerataan pembangunan di segala bidang. Pembangunan ekonomi akan diarahkan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan dan pengendalian stabilitas harga kebutuhan pokok. Tentunya dalam upaya mengurangi ketimpangan ekonomi masyarakat Jakarta, diperlukan keberpihakan pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah termasuk pedagang informal baik melalui kebijakan maupun penyediaan fasilitas dan modal kerja.

Dalam rangka mendukung kinerja DKI Jakarta diperlukan iklim yang kondusif sehingga memungkinkan semua elemen masyarakat dapat terlibat dan berperan serta secara optimal. Iklim kondusif hanya dapat dicapai bila suasana lingkungan terbebas dari berbagai gangguan keamanan dan konflik sosial yang berkepanjangan. Untuk itu, diperlukan penegakan hukum, pengendalian ketentraman dan ketertiban yang konsisten sehingga kondisi Jakarta aman, tentram, tertib dan teratur.

Guna mewujudkan mewujudkan kedua tujuan dari misi 4 tersebut, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah:

- Berkembangnya budaya kota multikultur yang berbasis komunitas
- Tersedianya pusat-pusat kebudayaan di semua wilayah kota Jakarta
- Terwujudnya upaya revitalisasi kawasan bersejarah kota sebagai daya tarik wisata kota
- Meningkatnya kreativitas masyarakat dalam pembangunan kota
- Meningkatnya kesadaran dan toleransi antar suku, agama dan ras (SARA)
- Meningkatnya pelayanan dan perlindungan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat kota terutama kaum marginal dan rentan
- Meningkatnya peran olahraga dalam pembangunan kualitas kehidupan masyarakat
- Meningkatnya kualitas dan perlindungan ketenagakerjaan
- Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban kota

Selanjutnya penjabaran sasaran pada misi 4 sebagaimana diamanatkan RPJMD DKI Jakarta tahun 2013 – 2017 terlihat pada tabel 4.4 berikut :

Tabel 4.4. penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan pada misi 4 ke dalam strategi pembangunan daerah

MISI IV :
Membangun budaya masyarakat perkotaan yang toleran, tetapi juga sekaligus memiliki kesadaran dalam memelihara kota

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
1. Mengembangkan budaya kota yang multikultur dan berbasis potensi lokal **2. Menjadikan masyarakat DKI**	1. Berkembangnya budaya kota multikultur yang berbasis komunitas 2. Tersedianya pusat-pusat kebudayaan di semua wilayah kota Jakarta 3. Terwujudnya upaya	1. Pengembangan budaya Betawi yang bersinergi dengan budaya multikultur lainnya 2. Pengembangan Jakarta sebagai pusat kebudayaan nasional

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Jakarta yang sejahtera, berakhlak mulia, disiplin dan partisipatif dalam memelihara kota.	revitalisasi kawasan bersejarah kota sebagai daya tarik wisata kota 4. Meningkatnya kreativitas masyarakat dalam pembangunan kota 5. Meningkatnya pelayanan dan perlindungan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat kota terutama kaum marginal dan rentan 6. Meningkatnya peran olahraga dalam pembangunan kualitas kehidupan masyarakat 7. Meningkatnya kualitas dan perlindungan ketenagakerjaan 8. Meningkatnya kesadaran dan toleransi antar suku, agama dan ras (SARA) 9. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban kota	3. Pengembangan pusat-pusat kebudayaan di lima wilayah kota dan Kepulauan Seribu 4. Revitalisasi kawasan Kota Tua Jakarta 5. Penataan bangunan dan gedung pemerintah yang bernuansa budaya Betawi 6. Penyelenggaraan event-event kebudayaan 7. Peningkatan kapasitas sanggar-sanggar budaya dan kesenian 8. Pengembangan skema jaminan dan perlindungan sosial bagi pekerja informal 9. Pengembangan sarana dan prasarana OR di seluruh wilayah 10. Peningkatan keterampilan dan kualitas tenaga kerja 11. Penyelengaraan pembinaan kesadaran dan toleransi antar suku, agama dan ras (SARA) 12. Peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dan pemerintah dalam meningkatkan ketentraman dan ketertiban kota

Sumber: RPJMD Provinsi DKI Jakarta tahun 2013 - 2017

E. MISI 5 :

Membangun pemerintahan yang bersih dan transparan serta berorientasi pada pelayanan publik

a. Tujuan 1 : Mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, bersih dan transparan

b. Tujuan 2 : Meningkatkan pelayanan publik prima bagi seluruh masyarakat

c. Tujuan 3 : Meningkatkan kesehatan masyarakat dan tingkat pendidikan masyarakat

d. Tujuan 4 : Mengendalikan pertumbuhan penduduk alami

Pada hakikatnya pembangunan pemerintahan yang bersih dan transparan serta berorientasi pada pelayanan publik merupakan pelaksanaan dari sasaran Pilar Aparatur yang difokuskan pada kejelasan fungsi regulator dan operator melalui penataan organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM), baik di tingkat Kelurahan, Kecamatan, Kota/kabupaten dan Provinsi serta kemudahan pengurusan perijinan, administrasi kependudukan, pelayanan kesehatan dan pendidikan.

Pembangunan pemerintahan yang bersih dan transparan serta berorientasi pada pelayanan publik merupakan upaya yang perlu didorong untuk

menunjang perwujudan kota Jakarta sebagai kota modern dan berdaya saing di masa depan. Tata kepemerintahan yang baik *(good governance)* merupakan muara dari upaya yang ingin diwujudkan melalui reformasi birokrasi dengan melalui ideologi Revolusi mental. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, Pemerintah wajib terus berupaya menyelenggarakan pelayanan publik yang semakin cepat, murah, mudah dan semakin baik. Untuk itu, reformasi birokrasi yang berlandaskan ideologi revolusi mental harus tetap memfokuskan pada aspek kelembagaan, aparatur, dan tata laksana. Tentunya Peningkatan pelayanan publik dan pengembangan reformasi birokrasi harus dilakukan bersamaan dengan reformasi pada bidang-bidang lain misalnya reformasi badan usaha daerah dan swasta serta lembaga-lembaga lainnya sehingga diharapkan dapat terjalin sinergi yang saling menguntungkan dan bermanfaat.

Disamping itu, Peningkatan kualitas pembangunan kesehatan merupakan bagian upaya menciptakan kualitas pelayanan publik yang prima dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan pembangunan kesehatan dilakukan melalui peningkatan kualitas kelembagaan, sumber daya manusia, dan tata kelola meliputi antara lain peningkatan kualitas prasarana sarana kesehatan, kualitas tenaga medis dan paramedis, perbaikan sistem pelayanan dengan memperhatikan keterjangkauan dan ketersediaan pelayanan untuk seluruh masyarakat Jakarta termasuk masyarakat miskin dan kelompok masyarakat berkebutuhan khusus. Mengingat kemajemukan warga Jakarta terutama dari aspek sosial ekonomi, maka upaya menjalin sinergitas dengan pemerintah pusat, dunia usaha, dan masyarakat akan terus ditingkatkan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran prioritas nasional dan penyediaan pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat Jakarta.

Lebih lanjut, peningkatan kualitas kesehatan juga harus diimbangi dengan peningkatan kualitas pendidikan yang tidak kalah penting dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal ini, akan terus dilakukan peningkatan kelembagaan sumber daya manusia dan tata laksana yang meliputi penyediaan prasarana dan sarana, peningkatan kualitas tenaga pendidik, pengelolaan sistem pendidikan yang berkualitas dan pembiayaan pendidikan. Dalam pelaksanaannya, diperlukan pertimbangan kebutuhan pasar tenaga kerja.

Upaya peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan akan terlaksana optimal apabila disertai dengan pengendalian kependudukan demi tercapaiannya pelayanan publik yang berkualitas dan merata. Pengendalian kependudukan di DKI Jakarta harus dilakukan secara sistematis dengan pola tepat dan memperhatikan aspek struktur, jumlah, kualitas, serta distribusi penduduk. Dinamika kependudukan di DKI Jakarta diakibatkan oleh faktor alami dan mobilitas penduduk terutama dari urbanisasi. Untuk mewujudkan pengendalian kependudukan dilakukan melalui peningkatan kelembagaan sumber daya manusia, dan tata laksana, serta peningkatan sistem informasi dan penegakan hukum dalam menurunkan pertumbuhan alami dan urbanisasi. Dalam pelaksanaannya diperlukan sinergi antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dengan penekanan pada kerjasama antar daerah dan peningkatan kualitas administrasi kependudukan terutama di tingkat kelurahan.

Guna mewujudkan mewujudkan keempat tujuan dari misi 5 tersebut, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah:

- Meningkatnya penataan kelembagaan yang tepat ukuran dan kewenangan yang jelas dan tidak tumpang tindih
- Meningkatnya ketersediaan SDM Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang sesuai dengan kompetensinya.
- Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada semua lapisan masyarakat
- Meningkatnya pelayanan pajak dan pelayanan perijinan yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi.
- Meningkatnya peran pemerintah, masyarakat dan partai politik dalam pembangunan demokrasi dan politis yang kondusif
- Meningkatnya peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses pembangunan
- Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan bagi semua masyarakat
- Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan masyarakat
- Terkendalinya pertumbuhan penduduk

Selanjutnya penjabaran sasaran pada misi 4 sebagaimana diamanatkan RPJMD DKI Jakarta tahun 2013 – 2017 terlihat pada Tabel 4.5 berikut :

Tabel 4.5. penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan pada misi 5 ke dalam strategi pembangunan daerah

MISI V :
Membangun pemerintahan yang bersih dan transparan serta berorientasi pada pelayanan publik

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
1. Mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, bersih dan transparan **2. Meningkatkan pelayanan publik prima bagi seluruh masyarakat** **3. Meningkatkan kesehatan masyarakat dan tingkat pendidikan masyarakat** **4. Mengendalikan pertumbuhan penduduk alami**	1. Meningkatnya penataan kelembagaan yang tepat ukuran dan kewenangan yang jelas dan tidak tumpang tindih 2. Meningkatnya ketersediaan SDM Pemprov DKI Jakarta yang sesuai dengan kompetensinya 3. Meningkatnya peran pemerintah, masyarakat dan partai politik dalam pembangunan demokrasi dan politis yang kondusif 4. Meningkatnya peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses pembangunan 5. Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada semua lapisan masyarakat 6. Meningkatnya pelayanan pajak dan pelayanan perijinan yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi 7. Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan bagi semua masyarakat	1. Pengembangan kelembagaan pemerintah yang efisien dan efektif 2. Pengembangan struktur organisasi dan tata laksana pemerintahan yang akuntabel 3. Pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel 4. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan yang berkelanjutan 5. Pengembangan sistem reward and punishment dalam pengem-bangan sumber daya manusia 6. Proses pengisian jabatan secara terbuka 7. Peningkatan kepedulian masyarakat pada pem-bangunan politik dan demokrasi 8. Peningkatan kapasitas dan peran partai politik dalam pembangunan politik dan demokrasi 9. Peningkatan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
	8. Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan masyarakat 9. Terkendalinya pertumbuhan penduduk	dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan 10. Pengembangan mekanisme pengaduan berbasis sistem informasi yang real-time 11. Penataan dan perbaikan sarana dan prasarana pelayanan publik yang lebih baik (cepat dan berkualitas) 12. Peningkatan kapasitas aparatur sebagai garda tedepan pelayanan 13. Pengembangan sistem informasi dalam mendukung pelayanan publik yang lebih baik 14. Peningkatan akses pelayanan pendidikan bagi seluruh golongan masyarakat menuju JAKARTA PINTAR 15. Peningkatan kualitas layanan pendidikan 16. Peningkatan akses pelayanan kesehatan bagi seluruh penduduk DKI Jakarta 17. Pengendalian pertumbuhan penduduk alami dan urbanisasi

Sumber: RPJMD Provinsi DKI Jakarta tahun 2013 - 2017

4.1.2.1 Prioritas Program Pembangunan Daerah

Selanjutnya strategi yang telah dirumuskan berdasarkan masing – masing sasaran pembangunan diperuntukkan untuk menyelesaikan permasalah utama dan mendesak di Provinsi DKI Jakarta yang dirumuskan dalam bentuk Isu Stategis pembangunan. Dengan memperhatikan isu strategis, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, program prioritas tahun 2016 dikelompokkan ke dalam empat kelompok yaitu:

(1) Program Unggulan, adalah program yang menjadi prioritas utama Gubernur dalam pencapaian visi – misi RPJMD.
(2) Program Prioritas, adalah program yang menjadi fokus daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pencapaian visi – misi RPJMD.
(3) Program Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal, adalah program dalam rangka pelaksanaan tupoksi SKPD khususnya yang terkait dengan pelayanan publik maupun tugas-tugas birokrasi lainnya.
(4) Program Operasional SKPD, adalah program yang mewadahi kebutuhan minimal beroperasinya sebuah SKPD dalam melaksanakan tupoksinya.

Program Unggulan yang tercantum pada RPJMD PRovinsi DKI Jakarta tahun 2013 – 2017 sebagaimana dimaksud di atas berdasarkan pengelompokan isu adalah sebagai berikut:

A. Prioritas Pengembangan Sistem Transportasi

1) Program Pembangunan Angkutan Umum Berbasis Jalan, berupa
   a) Pengembangan koridor Busway
   b) Penambahan armada Busway
   c) Penataan trayek dan peremajaan armada bus sedang
2) Program Pembangunan Angkutan Massal Berbasis Rel
   a) Pembangunan *Mass Rapid Transit* (MRT)
   b) Pembangunan *Light Rapid Transit* (LRT)/Kereta Rel Listrik Ringan
3) Program Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan
   a) Pembangunan *Fly Over* dan *Underpass*
   b) Pembangunan jalan tembus

B. Prioritas Antisipasi Banjir, Rob, Dan Genangan

1) Program Pembangunan Prasarana dan Sarana Pengendali Banjir
   a) Pengembangan situ, waduk dan embung
   b) Penguatan tanggul
   c) Pembuatan sumur resapan dan lubang biopori
   d) Pembangunan Terowongan bawah tanah multifungsi
2) Program Pengembangan Sistem Drainase
   a) Pengembangan sistem polder
   b) Normalisasi sungai dan saluran
   c) Pengerukan sungai dan saluran

C. Prioritas Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Pemukiman Kota

1) Program Penyediaan Perumahan Rakyat
   a) Pembangunan rumah susun sewa yang terpadu dengan fasilitas pasar, kesehatan dan olah raga
2) Program Kebijakan Pengembangan Perumahan
   a) Mendorong pembangunan hunian vertikal
3) Program Peningkatan Kualitas dan Perbaikan Kampung
   a) Penataan kampung dan lingkungan kumuh

D. Prioritas Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

1) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum
   a) Pembangunan Sarana Prasarana TPS Standar Ramah Lingkungan di 5 wilayah kota
   b) Pembangunan Tempat Transit Sampah Pesisir dan Pantai Pulau Pemukiman di Kepulauan Seribu
2) Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan
   a) Swastanisasi Penanganan Kebersihan di 44 Kecamatan
   b) Penanganan Sampah Pesisir dan Pantai Pulau-pulau di Kabupaten Adm. Kep. Seribu, Pesisir dan Pantai Utara Jakarta, serta Muara 13 (Tiga Belas) Sungai di Teluk Jakarta
   c) Penanganan Sampah Sungai

d) Penanganan Sampah di Saluran Mikro, Penghubung dan Taman di 5 wilayah kota

3) Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
   a) Pembangunan Sistem Informasi dan Pengawasan Penanganan Sampah

E. Prioritas Peningkatan Kualitas dan Kuantitas RTH

1) Program Peningkatan Kuantitas RTH Pertamanan dan Pemakaman
   a) Penambahan RTH melalui pembelian lahan dan kontribusi pengembang
2) Program Pemberdayaan dan Penggalangan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Pertamanan dan Pemakaman
   a) Penggalangan peran swasta dan masyarakat dalam penyediaan dan pemeliharaan RTH Publik/penghijauan lingkungan

F. Prioritas Pengurangan Ketimpangan Ekonomi dan Perluasan Kesempatan Kerja

1) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Koperasi dan UMKM
   a) Penyediaan ruang bagi ekonomi informal/PKL pada kawasan perkantoran dan perdagangan
   b) Membangun mall khusus bagi PKL
   c) Memperbaiki pasar-pasar tradisional

G. Prioritas Pembangunan Budaya Multi-Kultur

1) Program Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan
   a) Pengembangan karakter kota berciri khas betawi
2) Program Pengembangan Promosi dan Informasi Kebudayaan
   a) Penyelenggaran event budaya bertaraf internasional
3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan
   a) Pengembangan pusat kebudayaan Betawi
   b) Revitalisasi kota tua
4) Program Pemeliharaan dan Pembangunan gedung Pemda
   a) Pembangunan Masjid Raya Jakarta

H. Prioritas peningkatan pelayanan publik

1) Program Sistem Informasi danTeknologi Pajak Daerah
   a) Pengembangan pelayanan pajak online
2) Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kelurahan
   a) Pelayanan prima di Kelurahan
3) Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kecamatan
   a) Pelayanan prima di Kecamatan
4) Program peningkatan Investasi
   a) Pengembangan layanan perijinan secara online
5) Program Penataan dan Pengelolaan Ketatalaksanaan Kota/Kabupaten
   a) Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

I. Prioritas Peningkatan Kualitas Pendidikan

1) Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun
   a) Wajib Belajar 12 tahun
   b) Penerapan KARTU JAKARTA PINTAR
2) Program Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan

a) Peningkatan Daya Tampung Peserta Didik
b) Peningkatan Kualitas Gedung Sekolah

3) Program Peningkatan Mutu Pendidikan
a) Peningkatan kualitas dan kuantitas guru

J. Prioritas Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat

1) Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah
a) Pemberlakuan KARTU JAKARTA SEHAT

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan
a) Pengembangan Puskesmas Kecamatan menjadi Rawat inap selain RB
b) Penambahan kapasitas Tempat Tidur kelas tiga pada RSUD
c) Pelayanan kesehatan Masyarakat di pasar-pasar tradisional/rumah susun

3) Program Pembinaan Upaya Kesehatan
a) Pembentukan Kelurahan Siaga Aktif

4) Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
a) Penerapan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di Kelurahan

Selain merencanakan program unggulan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merencanakan pula berbagai Program Prioritas yang disusun berdasarkan misi dan isu strategis sebagai berikut:

Misi 1 :

(1) Isu Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota

a. Program perencanaan tata ruang
b. Program pemanfaatan ruang
c. Program Pengawasan dan Penertiban Bangunan
d. Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang
e. Program Pemberdayaan komunitas penyelenggara bangunan gedung
f. Program Peningkatan Pelayanan Ketataruangan
g. Program Pengembangan Sistem Informasi Tata Ruang

(2) Isu Pengurangan Ketimpangan Ekonomi dan Perluasan Kesempatan Kerja

a. Program Peningkatan Pelayanan Perdagangan Dalam Negeri
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Koperasi dan UMKM
c. Program Pengembangan Kelembagaan Koperasi
d. Program Penyediaan Dana Bergulir dan Kemitraan Koperasi dan UMKM
e. Program Pemberdayaan UMKM
f. Program pengamanan ketersediaan pangan, pengendalian Akses, Harga, Promosi, dan Distribusi/Pemasaran
g. Program peningkatan dan pengawasan mutu dan keamanan pangan hasil tanaman pangan dan hortikultura
h. Program peningkatan dan pengawasan mutu dan keamanan pangan hasil perikanan
i. Program peningkatan dan pengawasan mutu dan keamanan pangan produk hewan (kesmavet)
j. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
k. Program Penguatan sistem dan fasilitas pendukung pusat pelatihan kerja

l. Program peningkatan kesempatan Kerja dan peningkatan sistem pelayanan penempatan tenaga kerja

(3) Isu Pembangunan Energi dan Telematika Jakarta

a. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi
b. Program Pembinaan dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral

Misi 2 :

(1) Isu Pengembangan Sistem Transportasi

a. Program Pembangunan Angkutan Umum Berbasis Jalan
b. Program Pembangunan Angkutan Massal Berbasis Rel
c. Program Pembangunan Transportasi Perairan
d. Program Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan
e. Program Peningkatan Keselamatan Lalu lintas dan Angkutan
f. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
g. Program Pembangunan Transportasi Ramah Lingkungan
h. Program Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan

(2) Isu Antisipasi Banjir, Rob, Dan Genangan

a. Program Pembangunan Prasarana dan Sarana Pengendali Banjir
b. Program Pengembangan Sistem Drainase
c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum
d. Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya
e. Program Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pengendalian Banjir dan Drainase

(3) Isu Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

a. Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Limbah
b. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih
c. Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan
d. Program Pengurangan Timbulan Sampah di Sumber
e. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
f. Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
g. Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup
h. Program Pengurangan Resiko Bencana dan Kesiapsiagaan Pra Bencana
i. Program Peningkatan Sarana, Prasarana Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan

Misi 3 :

(1) Isu Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Pemukiman Kota

a. Program Penyediaan Perumahan Rakyat
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perumahan Rakyat
c. Program Penyiapan Masyarakat Calon Penghuni Rumah Susun
d. Program Kebijakan Pengembangan Perumahan

e. Program Koordinasi Serah Terima Rusun yang Dibangun Oleh APBN
f. Program Peningkatan Kualitas dan Perbaikan Kampung

(2) Peningkatan Kualitas dan Kuantitas RTH

a. Program Pemberdayaan dan Penggalangan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Pertamanan dan Pemakaman
b. Program Peningkatan Ruang Terbuka Hijau Pertanian dan Kehutanan
c. Program Peningkatan Kuantitas RTH Pertamanan dan Pemakaman
d. Program Pengelolaan RTH Pertamanan dan Pemakaman

Misi 4 :

(1) Isu Pembangunan Budaya Multi-Kultur

a. Program Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan
b. Program Pengembangan Promosi dan Informasi Kebudayaan
c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan
d. Program Peningkatan Pelaku dan Kelembagaan Kebudayaan
e. Program Pemeliharaan gedung Pemda
f. Program Penyediaan Informasi Perumahan, Permukiman dan Gedung Pemda
g. Program Pencegahan dan Penanggulangan Konflik
h. Program Pengembangan wawasan kebangsaan
i. Program Penguatan Hubungan Kelembagaan
j. Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat
k. Program Pendidikan Politik Masyarakat
l. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga dan Pemuda

Misi 5 :

(1) Isu peningkatan kapasitas aparatur

a. Program Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan SDM Aparatur
b. Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur
c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur DKI Jakarta
d. Program Peningkatan Disiplin dan Kinerja Aparatur DKI Jakarta

(2) Isu peningkatan pelayanan publik

a. Program Pengelolaan, Pengembangan dan Pemanfaatan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil
b. Program Implementasi Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik
c. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi
d. Program Sistem Informasi danTeknologi Pajak Daerah
e. Program Peningkatan Kinerja BUMD
f. Program Pengelolaan dan Pengembangaan Perencanaan Pembangunan
g. Program Komunikasi, Data dan Informasi Publik
h. Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kelurahan
i. Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kecamatan
j. Program Pendidikan dan Pelatihan
k. Program Pelayanan Penanaman Modal

l. Program Penataan dan Pengelolaan Ketatalaksanaan Kota/Kabupaten

(3) Isu Peningkatan Kualitas Pendidikan

a. Program Wajib Belajar Dua BelasTahun
b. Program Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan
c. Program Peningkatan Mutu Pendidikan

(4) Isu Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat

a. Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan
c. Program Keluarga Berencana

Adapun target capaian kinerja pembangunan dan target indikator pembangunan tahun 2013-2017 dapat yang difokuskan pada sinergi pembangunan antar berbagai tingkatan Pemerintahan yang didukung oleh *stakeholder* pembangunan, yang selengkapnya dapat dijabarkan pada Tabel 4.6 di bawah ini.

Tabel 4.6 Pencapaian dan target indikator kinerja daerah
Terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan
Provinsi DKI Jakarta tahun 2013 - 2017

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target dan Realisasi Tahun lalu				Target Capaian Tahun mendatang		
			2013		2014		2015	2016	2017
			Target	realisasi	Target	realisasi	Target	Target	Target
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi								
1	Pertumbuhan Ekonomi	6,50 %	6,90 %	6,11%	7,00 %	5,95%	7,10 %	7,20 %	7,30 %
2	Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku :	1.103,70 Triliun Rupiah	1.410,40 Triliun Rupiah	1.255,93 Triliun Rupiah	1.485,00 Triliun Rupiah	1.761,41 Triliun Rupiah	1.632,0 0 Triliun Rupiah	1.768,00 Triliun Rupiah	1.857,63 Triliun Rupiah
3	Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 :	449,80 Triliun Rupiah	501,21 Triliun Rupiah	477,29 Triliun Rupiah	505,42 Triliun Rupiah	1.374,35 Triliun Rupiah	535,42 Triliun Rupiah	563,42 Triliun Rupiah	593,42 Triliun Rupiah
4	Laju inflasi provinsi	4,52 %	5,0-6,0 %	8,00%	5,5-6,0 %	8,95%	6,5-7,5 %	5,5-6,5 %	6,0-7,0 %
5	PDRB per kapita atas harga berlaku	110,46 Juta Rupiah	124,2 Juta Rupiah	126,12 Juta Rupiah	135,8 Juta Rupiah	174,82 Juta Rupiah	140,58 Juta Rupiah	151,20 Juta Rupiah	160,00 Juta Rupiah
6	PDRB per kapita Atas Dasar Harga Konstan 2000	45,02 juta Rupiah	48,00 juta Rupiah	47,93 Juta Rupiah	50,00 juta Rupiah	136,41 Juta Rupiah (harga konstan 2010)	54,00 juta Rupiah	57,00 juta Rupiah	60,00 juta Rupiah
7	Indeks Gini	0,385	0,381	0,397 (th 2012)	0,377	0.436	0,373	0,366	0,360

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target dan Realisasi Tahun lalu				Target Capaian Tahun mendatang		
			2013		2014		2015	2016	2017
			Target	realisasi	Target	realisasi	Target	Target	Target
8	Persentase Penduduk Miskin	3,69%	3,63-3,65%	3,72%	3,57-3,61%	4,09 %	3,52-3,56%	3,46-3,51%	3,40-3,50%
9	Indeks Pembangunan Manusia	77,97	78,30	78,33 (IPM 2012)	78,55	78,59	78,80	79,10	79,60
10	Proporsi PDRB sektor konstruksi, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor keuangan, real estate dan jasa keuangan, serta sektor jasa-jasa atas dasar harga berlaku (%)	72,48 %	72,65 %	72,21%	72,80 %	72,9 %	72,95%	73,05 %	73,23 %
	Fokus Kesejahteraan Masyarakat								
1	**Pendidikan**								
1.1	Angka melek huruf	99,35%	99,50 %	99,21%	99,60 %	99,22%	99,95 %	99,97 %	99,99 %
1.2	Angka rata-rata lama sekolah	10,93 tahun	11,00 tahun	10.98 tahun	11,40 tahun	10,57 tahun	11,55 tahun	11,75 tahun	12,00 tahun
2	**Kesehatan**								
2.2	Angka Kematian Bayi	7,53 bayi per 1.000 kelahiran hidup)	7,5 bayi per 1.000 kelahiran hidup)	6,88 bayi per 1.000 kelahiran hidup	7,4 bayi per 1.000 kelahiran hidup)	4,18 bayi per 1.000 kelahiran hidup	7,3 bayi per 1.000 kelahiran hidup)	7,2 bayi per 1.000 kelahiran hidup)	7,1 bayi per 1.000 kelahiran hidup)
2.4	Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS	85%	90%	53% (Data MDGs)	95%	12%	95%	96%	97%

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target dan Realisasi Tahun lalu				Target Capaian Tahun mendatang		
			2013		2014		2015	2016	2017
			Target	realisasi	Target	realisasi	Target	Target	Target
3	**Ketenagakerjaan**								
3.1	Tingkat pengangguran terbuka (TPT)	10,8 %	10,5 %	9,02%	10,2 %	8,47 %	9,9 %	9,7 %	9,3 %
	ASPEK PELAYANAN UMUM								
	Fokus Layanan Urusan Wajib								
1.	**Pekerjaan Umum**								
1.1	Luas jalan yang terbangun	48.311.359,97 m^2	48.319.509, 97 m^2	205,908. 11 m2	48.428.709 ,97 m^2	11.210 m2	48.681. 709,97 m^2	49.318.3 09,97 m^2	50.050.809, 97 m^2
1.2	Jumlah jembatan yang terbangun	287 jembatan	287 jembatan	287 jembatan	293 jembatan	290 jembatan	296 jembata n	296 jembatan	296 jembatan
1.3	Persentase luas jalan dalam kondisi baik	96,78 %	96,95 %	99.6%	97,05 %	95,01 %	97,20 %	97,60 %	98,00 %
1.4	Jumlah lokasi rawan banjir	62 lokasi	55 lokasi	7 lokasi	50 lokasi		48 lokasi	45 lokasi	42 lokasi
1.5	Jumlah titik genangan jalan arteri/kolektor	13 titik	13 titik	44 titik	0	2 titik	0	0	0
1.6	Persentase fasilitas terbangun sistem air limbah terpusat	Tersedianya fasilitas sistem air limbah terpusat Zona 0 (4% dari seluruh DKI)	Penyusunan UKL UPL ground breaking Zona 1 dan pembebasan lahan IPAL Zona 1	Tidak terealisasi	Pembebasa n lahan IPAL Zona 1 lanjutan dan penyusuna n AMDAL Zona 1	UKL UPL *Ground breaking* zona 1 selesai	Pembeb asan lahan IPAL Zona 1 lanjutan dan penyus unan AMDAL Zona 6	Dimulainy a konstruks i perpipaan Zona 1	Konstruksi perpipaan Zona 1 lanjutan dan dimulainya konstruksi perpipaan Zona 6

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target dan Realisasi Tahun lalu				Target Capaian Tahun mendatang		
			2013		2014		2015	2016	2017
			Target	realisasi	Target	realisasi	Target	Target	Target
1.9	Persentase pengurangan timbulan sampah di sumber	7 %	14 %	9.66%	14 %	9,48 %	15%	15 %	15 %
2.	**Perumahan Rakyat**								
2.1	Persentase jumlah kebutuhan tempat tinggal yang terpenuhi	13% dari 8.000 Unit	17% dari 8.000 Unit	13% dari 8000	20% dari 8.000 Unit	26,86% dari 8.000 unit	25% dari 8.000 Unit	30% dari 8.000 Unit	40% dari 8.000 Unit
2.2	Lokasi kawasan permukiman kumuh yang ditata			40 lokasi (kampun g deret)		0			
3.	**Penataan Ruang**								
3.1	Persentase rencana bangunan gedung yan lulus sidang Tim Ahli	100 %	100 %	83%	100 %	51,18 %	100 %	100 %	100 %
3.2	Persentase pembongkaran bangunan yang tidak sesuai	25 %	30 %	149.33%	40 %	29 %	50 %	60 %	70 %
4.	**Perencanaan Pembangunan**								
5.	**Lingkungan Hidup**								
5.1	Persentase penurunan emisi Gas Rumah Kaca dengan baseline emisi GRK tahun 2005	3 %	4%	0,86%	5%	6 %	6%	7%	8%
5.2	Persentase status mutu air tercemar berat :								
	- sungai	65%	64%	58%	63%	32 %	62%	61%	60%
	- situ/waduk	37,5%	36,5%	28%	35,5%	28 %	34,5%	33,5%	32,5%
	- air tanah	12%	11%	13%	10%	0 %	9%	8%	7%
	- laut/teluk	18%	17%	36%	16%	38,6 %	15%	14%	13%
5.3	Rasio ruang terbuka hijau	9,9%	10,12%	9.91%	10,34%	9,93 %	10,56%	10,78%	11%
5.4	Rasio ruang terbuka biru	3%	3,0%		3,1%		3,2%	3,3%	3,4%
5.5	Jumlah taman yang digunakan sebagai taman kreativitas publik	10	20	0	30	14	40	50	60

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target dan Realisasi Tahun lalu				Target Capaian Tahun mendatang		
			2013		2014		2015	2016	2017
			Target	realisasi	Target	realisasi	Target	Target	Target
6.	**Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera**								
6.1	Total Fertility Rate	2,3	2,1	2,3%	2,1	2,2	2,1	2,1	2,1
7.	**Koperasi dan UMKM**								
8.	**Kebudayaan**								
8.1	Penyelenggaraan event budaya berbasis komunitas	15 Event	34	34 event	53	5 event	72	91	110
8.2	Jumlah pusat kebudayaan di wilayah kota Jakarta dan kawasan revitalisasi bersejarah	- 12 Pusat Seni - 12 Museum	- 20 Pusat Seni - 12 Museum	-21 Pusat Seni - 1 Museum	- 30 Pusat Seni - 13 Museum	- 21 pusat kebudayaan	- 40 Pusat Seni - 13 Museum	- 50 Pusat Seni - 13 Museum	- 60 Pusat Seni - 14 Museum
8.3	Jumlah Pelestarian Bangunan dan Lingkungan Cagar Budaya melalui Konservasi	- 12 Bangunan - 3 Lingkungan Cagar Budaya	13 Bangunan - 3 Lingkungan Cagar Budaya	- 4 Bangunan - 3 Lingkungan Cagar Budaya	14 Bangunan - 4 Lingkungan Cagar Budaya	- 4 Lingkungan Cagar Budaya	15 Bangunan - 4 Lingkungan Cagar Budaya	16 Bangunan - 4 Lingkungan Cagar Budaya	17 Bangunan - 5 Lingkungan Cagar Budaya
9.	**Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri**								
9.1	Jumlah konflik sosial	25 kasus	22	22	19	19 Kasus	16	13	10
9.2	Indeks demokrasi	77,44	78,95	77,44	80,46	71,18	81,98	83,49	85,00
9.3	Jumlah lokasi rawan ketertiban umum	24 lokasi	23	7	21	9	19	17	15

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target dan Realisasi Tahun lalu				Target Capaian Tahun mendatang		
			2013		2014		2015	2016	2017
			Target	realisasi	Target	realisasi	Target	Target	Target
10.	**Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian**								
10.2	Jumlah organisasi masyarakat peduli bencana	5 SKKL	10	10 SKKL	15	0	20	25	30
10.3	Indeks efektifitas pemerintahan	0	0,1	0,0	0,2	0,0	0,3	0,4	0,5
10.4	Rasio SDM yang memenuhi standar kompetensi jabatan	25 %	35%		50%	89%	65%	75%	85%
10.5	opini BPK dan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP-Dengan Paragraf Penjelas	WTP	WTP	WTP
10.6	Rasio anggaran hasil musrenbang yang tertampung dalam APBD	2,5%	4%	2,65%	5,5%	2,45%	7%	8,5%	10%
10.8	Sistem pelayanan perijinan terpadu secara on-line	1) Sistem Jaringan Lokal 2) Masih bersifat "kantor pos" 3) 3.017 Pemohon 4) Tingkat kepuasan masyarakat 79,73%	1) Sistem Jaringan Online 2) Masih bersifat "kantor pos" 3) 4.417 Pemohon 4)83,78	Pengembangan system online	1) Sistem Jaringan Online 2) Badan Perijinan Terpadu 3) 5.809 Pemohon 4)87,84	1) PTSP	1) Sistem Jaringan Online 2) Badan Perijinan Terpadu 3) 7.205 Pemohon 4)91,89	1) Sistem Jaringan Online 2) Badan Perijinan Terpadu 3) 8.601 Pemohon 4)95,95	1) Sistem Jaringan Online 2) Badan Perijinan Terpadu 3) 10.005 Pemohon 4)100

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target dan Realisasi Tahun lalu				Target Capaian Tahun mendatang		
			2013		2014		2015	2016	2017
			Target	realisasi	Target	realisasi	Target	Target	Target
11.	**Ketahanan Pangan**								
11.1	Persentase Pasokan Beras	88,5%	100%	100%	100%	100 %	100%	100%	100%
11.2	Persentase Pasokan Daging	98,15%	100%	90%	100%	100 %	100%	100%	100%
11.3	Persentase Pusat Distribusi Ikan	95,55%	100%	100%	100%	100 %	100%	100%	100%
11.4	Persentase Pusat Distribusi Ayam	96,37%	100%	100%	100%	100 %	100%	100%	100%
11.5	Persentase Pusat Distribusi Telor dan Susu	98,15%	100%	100%	100%	100 %	100%	100%	100%
11.6	Persentase Pusat Distribusi Sayur Mayur	85,53%	100%	100%	100%	100 %	100%	100%	100%
11.7	Persentase Pusat Distribusi Buah-buahan	119,6%	120%	100%	120%	120%	120%	120%	120%
	Fokus Layanan Urusan Pilihan								
1	**Energi dan Sumber Daya Mineral**								
1.1	Fasilitasi pembangkit listrik baru oleh swasta/BUMD	0	0	0	0	0	0	0	1 Unit Pembangkit Listrik
1.2	Jumlah SPBG	11 SPBG	14 SPBG	15 SPBG	15 SPBG	6 SPBG	16 SPBG	17 SPBG	18 SPBG
	ASPEK DAYA SAING DAERAH								
	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah								
	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	57.208.758	58.302.027	61,01%	59.223.127	60,72%	60.009.760	60.689.368	61.282.402
	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastuktur								
4	Panjang ruas jalan yang dilintasi :								

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target dan Realisasi Tahun lalu				Target Capaian Tahun mendatang		
			2013		2014		2015	2016	2017
			Target	realisasi	Target	realisasi	Target	Target	Target
	- Panjang lintasan Busway	203,5 km	225,43	0	247,36	208 km	269,29	291,22	313,15
	- Panjang lintasan MRT	0	1,5	0	3,5	-	7,5	15,7	15,7
	- Panjang lintasan LRT	0	0	0	0,8	-	8,8	16,8	24,82
5	Jumlah penumpang :								
	- Busway	304.799 pnp/hari	400.000 pnp/hari	308.281 pnp/hari	550.000 pnp/hari	306.343 pnp/hari	730.000 pnp/hari	850.000 pnp/hari	1.000.000 pnp/hari
	- MRT	0	0	0	0	0	0	40.000.000	40.000.000
	- LRT	0	0		0		0	0	103.320.000
6	Prosentase prasarana KEK : Jalan Tol, pembangkit listrik, pengolahan air limbah, ITF, mess karyawan, akses masuk, angkutan umum.	0%	0%	0%	5%	0%	10%	20%	25%
7	Prosentase sarana KEK : Pelabuhan, *container yard*, pegudangan, industri *Hi-Tech*, bea cukai dan imigrasi terpadu.	0%	0%	0%	5%	0%	10%	20%	25%
8	Jumlah titik jaringan wifi dengan kecepatan up to 10 Mbps yang terbangun	42 titik	50 titik	18 titik	75 titik	180 titik	125 titik	125 titik	125 titik
	Fokus Iklim Berinvestasi								
1	Nilai investasi berskala Nasional (PMDN/PMA) :	- PMDN . 9,84 Triliun - PMA 45 Triliun	- PMDN 10,59 Triliun - PMA 48,48 Triliun	- PMDN 5,75 Triliun - PMA 31,09 Triliun	- PMDN 11,38 Triliun - PMA 52,09 Triliun	- PMDN : Rp.10,54 Triliun - PMA : Rp. 37,65 Triliun	- PMDN 12,15 Triliun - PMA 55,62 Triliun	- PMDN 13,02 Triliun - PMA 59,57 Triliun	- PMDN 13,97 Triliun - PMA 63,94 Triliun
2	Jumlah investor berskala nasional	- PMDN 89	- PMDN 91	- PMDN	- PMDN 94	- PMDN	- PMDN	- PMDN 98	- PMDN 100

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target dan Realisasi Tahun lalu				Target Capaian Tahun mendatang		
			2013		2014		2015	2016	2017
			Target	realisasi	Target	realisasi	Target	Target	Target
	(PMDN/PMA):	proyek - PMA 1.148 proyek	proyek - PMA 1.215 proyek	156 Proyek - PMA 3.028 Proyek	proyek - PMA 1.298 proyek	108 proyek - PMA 2.519 proyek	96 proyek - PMA 1.350 proyek	proyek - PMA 1.425 proyek	proyek - PMA 1.500 proyek

4.2 Prioritas dan Pembangunan Daerah Tahun 2016

Penentuan prioritas pembangunan daerah tahun 2016 dilakukan dengan mempertimbangkan dan mendasarkan empat hal sebagai berikut:

(1) Hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah tahun 2014 yang menunjukkan berbagai permasalahan dan isu strategis yang dihadapi oleh masyarakat DKI Jakarta yang bersifat mendesak dam harus segera diatasi pada tahun 2016;
(2) Arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang dijabarkan dalam sembilan (9) agenda pembangunan (NAWA CITA) sebagaimana tercantum dalam RKP Tahun 2016;
(3) Arah kebijakan RPJMD DKI Jakarta Tahun 2013-2017 guna tercapainya visi dan misi Gubernur sebagaimana ditetapkan dalam arah kebijakan tahun 2016.

4.2.1 Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah

Hasil evaluasi terhadap kinerja pembangunan daerah tahun 2014 dan perkiraan kinerja tahun 2015 menunjukkan ada sepuluh isu strategis yang harus diatasi pada tahun 2016. Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap.

Isu strategis pembangunan daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016 berdasarkan evaluasi dan analisis saat ini adalah sebagai berikut:

4.2.1.1 Isu Pengembangan Sistem Transportasi yang mencakup permasalahan:

- tidak mencukupinya kapasitas jalan yang ada,
- terbatasnya ketersediaan dan pelayanan angkutan umum,
- belum terintgrasinya sistem dan jaringan multimoda,
- rendahnya disiplin masyarakat dalam berlalu lintas.

4.2.1.2 Isu Antisipasi Banjir, Rob, dan Genangan yang mencakup permasalahan:

- tingginya intensitas hujan di wilayah hulu sungai,
- tingginya intensitas curah hujan di wilayah hilir dengan topografi wilayah rendah,
- terjadinya banjir dan genangan akibat pasang air laut (rob).

4.2.1.3 Isu Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Pemukiman Kota yang mencakup permasalahan:

- Terbatasnya penyediaan hunian yang layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat Jakarta,

- kebutuhan rumah terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan keluarga baru,
- keterbatasan lahan di wilayah Jakarta,
- masih terdapatnya permukiman yang kurang sehat dan tertata.

4.2.1.4 Isu Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mencakup permasalahan:

- Akses akan air bersih bagi seluruh masyarakat belum optimal;
- meningkatnya produksi sampah kota,
- belum terpadunya sistem pengelolaan sampah,
- terbatasnya penyediaan tempat pemrosesan akhir,
- terus meningkatnya pencemaran air sungai akibat pembuangan limbah domestik rumah tangga dan sampah pabrikda,
- tingginya pencemaran udara berasal dari emisi kendaraan bermotor.

4.2.1.5 Isu Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang mencakup permasalahan:

- terbatasnya jumlah lahan yang dapat dimanfaatkan untuk ruang terbuka hijau,
- belum meratanya penyebaran RTH secara proporsional di wilayah DKI Jakarta.

4.2.1.6 Isu Pengurangan Ketimpangan Ekonomi dan Perluasan Kesempatan Kerja yang mencakup permasalahan:

- masih terdapatnya kemiskinan perkotaan,
- meningkatnya angka pengangguran terbuka,

4.2.1.7 Isu Pembangunan Budaya Multi-Kultur yang mencakup permasalahan:

- adanya keragaman sosial dan budaya masyarakat Jakarta selain sebagai potensi pembangunan juga sebagai faktor pendorong terjadinya konflik sosial yang bersifat primodial dan partisan,
- masih adanya konflik dan ketegangan sosial biasanya terjadi akibat fanatisme berlebihan dari suatu kelompok masyarakat.
- belum optimalnya sinergitas antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam mewujudkan Jakarta yang aman, tentram dan tertib.

4.2.1.8 Isu Peningkatan Pelayanan Publik yang mencakup permasalahan:

- Belum optimalnya pelaksanaan konsep reformasi birokrasi secara efisien dan efektif, pembenahan birokrasi menyangkut perubahan sikap dan tingkah laku (*mind set*) seluruh aparat pemerintahan secara terpadu dan berkesinambungan,
- Belum optimalnya penataan kelembagaan atau institusi yang efisien dengan tata laksana yang jelas (transparan),
- Belum optimalnya pelayanan prima oleh aparat yang didukung oleh SDM yang andal, profesional, tranparan dan akuntabel,

- Belum optimalnya sinergi antara SKPD provinsi dan unit kerja di kota dan kabupaten administrasi,
- Belum optimalnya kerjasama dan kemitraan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan masyarakat dan dunia usaha dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan.

4.2.1.9 Isu Peningkatan Kualitas Pendidikan yang mencakup permasalahan:

- masih banyaknya prasarana dan sarana pendidikan dasar yang perlu diperbaiki dan peningkatan proses belajar mengajar agar lulusan dapat lebih berkualitas
- belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam penataan dan pengembangan urusan pendidikan dan peningkatan akses pendidikan untuk semua lapisan masyarakat serta masih terjadi tawuran antarpelajar,
- masih adanya kasus penyimpangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang pendidikan yang merugikan rakyat dan negara.

4.2.1.10 Isu Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat yang mencakup permasalahan:

- belum optimalnya pelaksanaan sistem pelayanan kesehatan,
- masih adanya angka kematian ibu dan anak,
- terbatasnya jumlah dan mutu tenaga kesehatan yang professional dan andal,
- kurang meratanya penyebaran jumlah tenaga kesehatan dan fasilitas tenaga kesehatan,
- belum optimalnya pelayanan pada rumah sakit dan puskesmas baik dari segi waktu, keterlibatan, totalitas dan kualitas,
- masih tingginya angka kesakitan penyakit menular dan tidak menular, dan
- rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan lingkungan.

4.2.2 Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2016

Aspek keberlanjutan pembangunan nasional merupakan hal yang strategis untuk menjaga kesinambungan antara pembangunan tahun sebelumnya, tahun berjalan dan tahun akan datang. Oleh karena itu dinamika sosial ekonomi tidak boleh mengganggu keberlangsungan pembangunan Provinsi DKI Jakarta secara keseluruhan. Pelaksanaan pembangunan Nasional tahun 2015 diarahkan untuk meletakkan dasar fondasi bagi percepatan pencapaian tujuan pembangunan yaitu Indonesia yang lebih berdaulat dalam politik, lebih berdikari dalam bidang ekonomi, dan lebih berkepribadian dalam bidang kebudayaan. Selanjutnya untuk menjaga keberlanjutan, konsistensi dan kesinambungan maka Pembangunan Nasional tahun 2016 dirancang sebagai lanjutan upaya yang telah dimulai tahun 2015. Adapun Tema RKP 2016 adalah sebagai berikut:

"MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR UNTUK MEMPERKUAT FONDASI PEMBANGUNAN YANG BERKUALITAS"

Selanjutnya dalam mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengacu kepada dimensi pembangunan sektor unggulan sebagaimana yang tercantum pada RKP 2016 dengan prioritas sebagai berikut:

(1) Kedaulatan pangan. Indonesia mempunyai modal yang cukup untuk memenuhi kedaulatan pangan bagi seluruh rakyat, sehingga tidak boleh tergantung secara berlebihan kepada negara lain.

(2) Kedaulatan energi dan ketenagalistrikan. Dilakukan dengan memanfaatkan sebesar-besarnya sumber daya energi (gas, batu-bara, dan tenaga air) dalam negeri.

(3) Kemaritiman dan kelautan. Kekayaan laut dan maritim Indonesia harus dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat.

(4) Pariwisata dan industri. Potensi keindahan alam dan keanekaragaman budaya yang unik merupakan modal untuk pengembangan pariwisata nasional. Sedangkan industri diprioritaskan agar tercipta ekonomi yang berbasiskan penciptaan nilai tambah dengan muatan iptek, keterampilan, keahlian, dan SDM yang unggul.

4.2.3 Arah Kebijakan RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017

RKPD Tahun 2016 merupakan tahun keempat pelaksanaan RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017 dengan visi: **"Jakarta Baru, Kota Modern yang Tertata Rapi, Menjadi Tempat Hunian yang Layak dan Manusiawi, Memiliki Masyarakat yang Berkebudayaan, dan Dengan Pemerintahan yang Berorientasi pada Pelayanan Publik",** dan misi pembangunan sebagai berikut.

(1) Mewujudkan Jakarta sebagai kota modern yang tertata rapi serta konsisten dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;

(2) Menjadikan Jakarta sebagai kota yang bebas dari masalah-masalah menahun seperti macet, banjir, pemukiman kumuh, sampah dan lain-lain;

(3) Menjamin ketersediaan hunian dan ruang publik yang layak serta terjangkau bagi warga kota;

(4) Membangun budaya masyarakat perkotaan yang toleran, tetapi juga sekaligus memiliki kesadaran dalam memelihara kota;

(5) Membangun pemerintahan yang bersih dan transparan serta berorientasi pada pelayanan publik.

Dokumen RKPD tahun 2016 merupakan penjabaran dari tahun keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Memengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta tahun 2013 - 2017 yaitu pada tahapan:

"Pemantapan Capaian Pembangunan dan Penyempurnaan Pelayanan Pemerintah Daerah"

Untuk pentahapan dan posisi RKPD tahun 2016 ditunjukkan oleh Gambar 4.2 berikut:

Gambar 4.2 Fokus/Tema Pembangunan Provinsi DKI Jakarta 2016

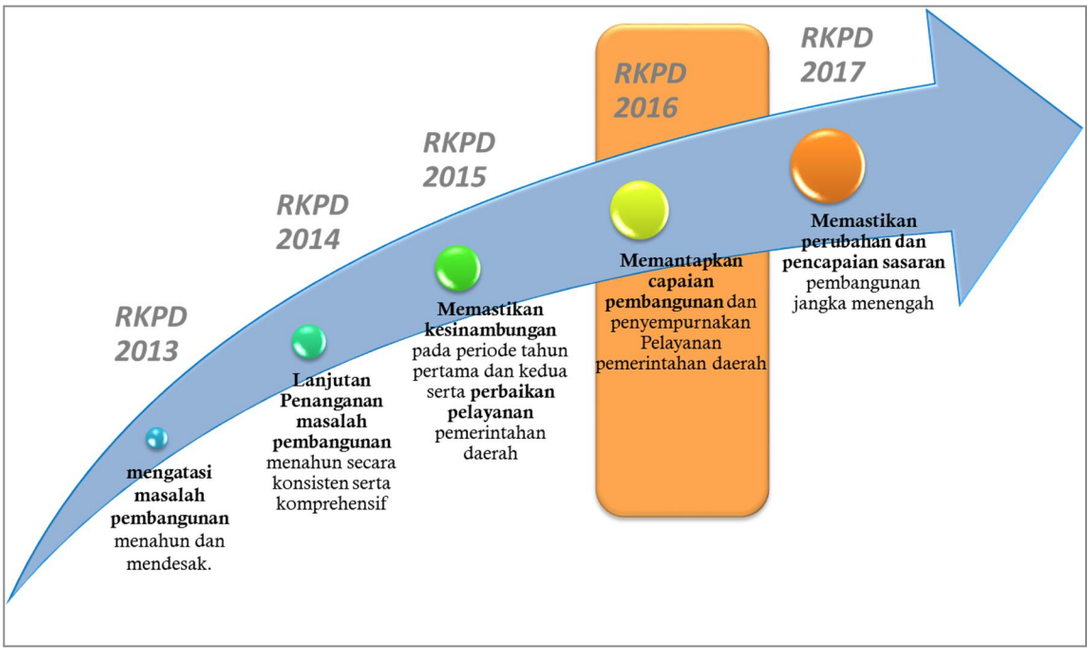

Arah kebijakan pembangunan DKI Jakarta tahun 2016 ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat dan memantapkan capaian pembangunan yang telah dilaksanakan pada tahun 2013, 2014 dan 2015 dengan terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan. Pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pada tahun 2016 diarahkan pada upaya untuk mensinergikan capaian pembangunan di masing-masing bidang/sektor agar terwujud pembangunan DKI Jakarta yang berkelanjutan secara fisik, sosial dan ekonomi. Sinergitas kebijakan, program dan kebijakan antar bidang dilakukan dalam rangka mewujudkan kota Jakarta sebagai kota modern yang tertata rapi.

Arah kebijakan pembangunan DKI Jakarta tahun 2016 ditekankan pada penanganan masalah menahun (banjir, kemacetan, prasarana kota), penyediaan pelayanan publik, penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan budaya kota, pengembangan kawasan-kawasan strategis yang memiliki potensi ekonomi untuk terus dikembangkan secara terpadu melibatkan para pemangku kepentingan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2016 akan mendorong penataan dan revitalisasi kawasan untuk meningkatkan daya tarik kota dan sekaligus meningkatkan daya saing ekonomi kota di tingkat global dan regional.

Gambar 4.3 Keterkaitan Isu Startegis, Arah Kebijakan Nasional, Arah Kebijakan RPJMD dan Prioritas Pembangunan Provinsi DKI Jakarta 2016

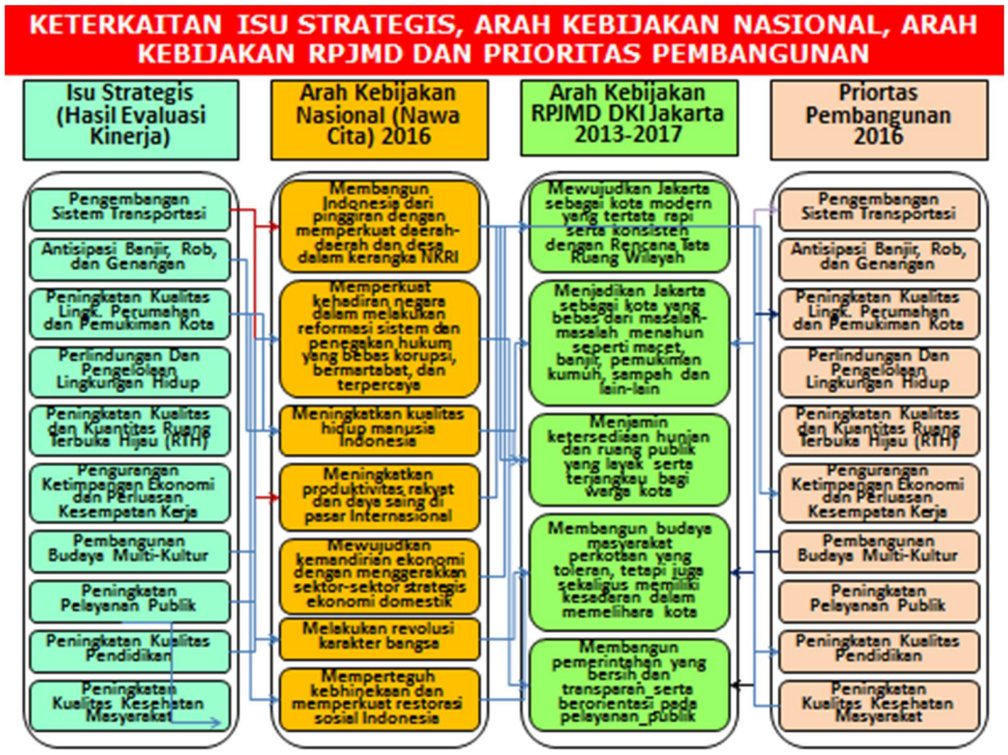

4.3 Prioritas Pembangunan Wilayah Tahun 2016

Prioritas pembangunan DKI Jakarta tahun 2016 juga memperhatikan dimensi kewilayahan pada pengembangan kawasan-kawasan strategis yang memiliki potensi ekonomi untuk terus dikembangkan secara terpadu melibatkan para pemangku kepentingan. Kawasan strategis merupakan bagian wilayah kota yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota di bidang ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan dan dalam pengembangan kawasan strategis diperlukan langkah yang terpadu, komprehensif, dan berkelanjutan sesuai arah kebijakan pembangunan nasional dan daerah.

Oleh karena itu, Pemerintah Daerah memiliki peran penting dalam mendorong penataan dan revitalisasi kawasan dapat meningkatkan daya saing ekonomi kota di tingkat global dan regional. Perbaikan terhadap berbagai masalah menahun kota diharapkan turut meningkatkan daya tarik kota untuk menarik investasi yang lebih banyak.

4.3.1 Prioritas Pembangunan Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu merupakan wilayah kepulauan dengan prasarana dan sarana yang terbatas. Isu strategis yang dihadapi oleh masyarakat Kabupaten Kepulauan Seribu adalah terbatasnya prasarana dan sarana perumahan dan permukiman, dermaga, listrik, sanitasi, dan air bersih; kurangnya pelayanan publik di bidang pendidikan

dan kesehatan; terbatasnya peluang ekonomi; tingginya ketergantungan pasokan bahan kebutuhan pokok dari daerah lain; dan tingginya biaya hidup akibat terbatasnya akses transportasi.

Prioritas pembangunan pada tahun 2016 adalah

(1) Penyediaan prasarana dan sarana dasar seperti perumahan dan permukiman, dermaga, listrik, dan air bersih;
(2) Perluasan dan pengembangan akses pelayanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan;
(3) Pengembangan kegiatan ekonomi yang produkitf, bernilai tambah tinggi dan memberi pendapatan bagi masyarakat; serta menciptakan kesempatan kerja;
(4) Peningkatan distribusi pasokan bahan kebutuhan pokok dari daerah lain; dan
(5) Perluasan dan peningkatan akses transportasi untuk mengurangi beban biaya hidup.

4.3.2 Prioritas Pembangunan Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan

Kota Administrasi Selatan merupakan wilayah perkotaan yang menjadi simpul penghubung dengan wilayah Depok, Bogor dan Tangerang yang menjadi pusat bisnis, pusat pendidikan, dan pusat kegiatan sosial dengan prasarana dan sarana yang lengkap dan modern. Isu strategis yang dihadapi oleh masyarakat Kota Administrasi Jakarta Selatan adalah terjadinya kemacetan parah sebagai akibat penumpukan kendaraan pada pagi hari dan sore hari terutama di bekas Terminal Lebak Bulus dan Jalan Fatmawati, banyaknya pengemudi angkutan umum dan pengemudi kendaraan pribadi yang tidak disiplin dan ngetem, dan dampak pembangunan *mass rapid transportation*; masih sering terjadinya genangan dan banjir sebagai akibat terbatasnya gorong-gorong; munculnya konflik antarwarga sebagai akibat pergesekan kepentingan; terbatasnya tempat usaha; meningkatnya penggunaan bahu jalan dan trotoar untuk kegiatan usaha; adanya gangguan ketertiban dan kriminalitas.

Prioritas pembangunan Kota Administrasi Jakarta Selatan pada tahun 2016 adalah

(1) Pengurangan dan penyelesaian kemacetan dengan melakukan rekayasa lalu lintas untuk mengurangi penumpukan kendaraan pada pagi hari dan sore hari terutama di bekas Terminal Lebak Bulus dan Jalan Fatmawati;
(2) Penegakan disiplin dan pemberian sanksi bagi pengemudi angkutan umum yang ngetem dan pengemudi kendaraan pribadi yang tidak disiplin;
(3) Pengamanan tempat pembangunan pembangunan *mass rapid transportation*;
(4) Perbaikan selokan dan gorong-gorong yang menyebabkan genangan dan banjir

(5) Perluasan kerjasama Lurah dan Camat dengan masyarakat dan organisasi masyarakat untuk mencegah munculnya konflik antarwarga sebagai akibat pergesekan kepentingan
(6) Pembangunan dan penyediaan tempat usaha bagi pelaku usaha kecil dan menengah;
(7) Penerapan disiplin dan saksi tegas terhadap penyalahgunaan bahu jalan dan trotoar untuk kegiatan usaha; dan
(8) Peningkatan dan perluasan kerjasama dengan Polri dan masyarakat dalam mengatasi gangguan ketertiban dan kriminalitas.

4.3.3 Prioritas Pembangunan Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur

Kota Administrasi Selatan merupakan wilayah perkotaan yang menjadi simpul penghubung dengan wilayah Depok, Bogor dan Tangerang yang menjadi pusat bisnis, pusat pendidikan, dan pusat kegiatan sosial dengan prasarana dan sarana yang lengkap dan modern. Isu strategis yang dihadapi oleh masyarakat Kota Administrasi Jakarta Selatan adalah terjadinya kemacetan parah sebagai akibat penumpukan kendaraan pada pagi hari dan sore hari terutama di bekas Terminal Lebak Bulus dan Jalan Fatmawati, banyaknya pengemudi angkutan umum dan pengemudi kendaraan pribadi yang tidak disiplin dan ngetem, dan dampak pembangunan *mass rapid transportation*; masih sering terjadinya genangan dan banjir sebagai akibat terbatasnya gorong-gorong; munculnya konflik antarwarga sebagai akibat pergesekan kepentingan; terbatasnya tempat usaha; meningkatnya penggunaan bahu jalan dan trotoar untuk kegiatan usaha; adanya gangguan ketertiban dan kriminalitas.

Prioritas pembangunan Kota Administrasi Jakarta Selatan pada tahun 2016 adalah

(1) Pengurangan dan penyelesaian kemacetan dengan melakukan rekayasa lalu lintas untuk mengurangi penumpukan kendaraan pada pagi hari dan sore hari terutama di bekas Terminal Lebak Bulus dan Jalan Fatmawati;
(2) Penegakan disiplin dan pemberian sanksi bagi pengemudi angkutan umum yang ngetem dan pengemudi kendaraan pribadi yang tidak disiplin;
(3) Pengamanan tempat pembangunan pembangunan *mass rapid transportation*;
(4) Perbaikan selokan dan gorong-gorong yang menyebabkan genangan dan banjir
(5) Perluasan kerjasama Lurah dan Camat dengan masyarakat dan organisasi masyarakat untuk mencegah munculnya konflik antarwarga sebagai akibat pergesekan kepentingan
(6) Pembangunan dan penyediaan tempat usaha bagi pelaku usaha kecil dan menengah;
(7) Penerapan disiplin dan saksi tegas terhadap penyalahgunaan bahu jalan dan trotoar untuk kegiatan usaha; dan
(8) Peningkatan dan perluasan kerjasama dengan Polri dan masyarakat dalam mengatasi gangguan ketertiban dan kriminalitas.

4.3.4 Prioritas Pembangunan Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat

Kota Administrasi Pusat merupakan wilayah perkotaan yang menjadi pusat pemerintahan, pusat bisnis, pusat pendidikan, dan pusat kegiatan sosial budaya dengan prasarana dan sarana yang lengkap dan modern. Isu strategis yang dihadapi oleh masyarakat Kota Administrasi Jakarta Pusat adalah terjadinya kemacetan sebagai akibat penumpukan kendaraan pada pagi hari dan sore hari, banyaknya pengemudi angkutan umum dan pengemudi kendaraan pribadi yang tidak disiplin dan ngetem, dan dampak pembangunan *mass rapid transportation*; masih sering terjadinya genangan dan banjir sebagai akibat terbatasnya gorong-gorong; munculnya konflik antarwarga sebagai akibat pergesekan kepentingan; terbatasnya tempat usaha; meningkatnya penggunaan bahu jalan dan trotoar untuk kegiatan usaha; adanya gangguan ketertiban dan kriminalitas.

Prioritas pembangunan Kota Administrasi Jakarta Pusat pada tahun 2016 adalah

(1) Pengurangan dan penyelesaian kemacetan dengan melakukan rekayasa lalu lintas untuk mengurangi penumpukan kendaraan pada pagi hari dan sore hari;
(2) Penegakan disiplin dan pemberian sanksi bagi pengemudi angkutan umum yang ngetem dan pengemudi kendaraan pribadi yang tidak disiplin;
(3) Pengamanan tempat pembangunan pembangunan *mass rapid transportation*;
(4) Perbaikan selokan dan gorong-gorong yang menyebabkan genangan dan banjir
(5) Perluasan kerjasama Lurah dan Camat dengan masyarakat dan organisasi masyarakat untuk mencegah munculnya konflik antarwarga sebagai akibat pergesekan kepentingan
(6) Pembangunan dan penyediaan tempat usaha bagi pelaku usaha kecil dan menengah;
(7) Penerapan disiplin dan saksi tegas terhadap penyalahgunaan bahu jalan dan trotoar untuk kegiatan usaha; dan
(8) Peningkatan dan perluasan kerjasama dengan Polri dan masyarakat dalam mengatasi gangguan ketertiban dan kriminalitas.

4.3.5 Prioritas Pembangunan Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat

Kota Administrasi Selatan merupakan wilayah perkotaan yang menjadi simpul penghubung dengan bandara internasional Soekarno-Hatta di wilayah Tangerang, Provinsi Banten yang menjadi pusat bisnis, pusat pendidikan, dan pusat kegiatan sosial dengan prasarana dan sarana yang lengkap dan modern. Isu strategis yang dihadapi oleh masyarakat Kota Administrasi Jakarta Barat adalah terjadinya kemacetan parah sebagai akibat penumpukan kendaraan pada pagi hari dan sore hari, banyaknya pengemudi angkutan umum dan pengemudi kendaraan pribadi yang tidak disiplin dan ngetem, dan dampak pembangunan *mass rapid transportation*; masih adanya kawasan kumuh; masih sering terjadinya genangan dan banjir

sebagai akibat terbatasnya gorong-gorong; munculnya konflik antarwarga sebagai akibat pergesekan kepentingan; terbatasnya tempat usaha; meningkatnya penggunaan bahu jalan dan trotoar untuk kegiatan usaha; adanya gangguan ketertiban, penyalahgunaan narkoba dan kriminalitas.

Prioritas pembangunan Kota Administrasi Jakarta Selatan pada tahun 2016 adalah

(1) Pengurangan dan penyelesaian kemacetan dengan melakukan rekayasa lalu lintas untuk mengurangi penumpukan kendaraan pada pagi hari dan sore hari terutama yang menghubungkan Kota Jakarta dengan Bandara Internasional Soekarno-Hatta;
(2) Penegakan disiplin dan pemberian sanksi bagi pengemudi angkutan umum yang ngetem dan pengemudi kendaraan pribadi yang tidak disiplin;
(3) Pembangunan perumahan dan permukiman terutama untuk masyarakat yang tinggal di kawasan kumuh;
(4) Pengamanan tempat pembangunan pembangunan *mass rapid transportation*;
(5) Perbaikan selokan dan gorong-gorong yang menyebabkan genangan dan banjir;
(6) Perluasan kerjasama Lurah dan Camat dengan masyarakat dan organisasi masyarakat untuk mencegah munculnya konflik antarwarga sebagai akibat pergesekan kepentingan
(7) Pembangunan dan penyediaan tempat usaha bagi pelaku usaha kecil dan menengah;
(8) Penerapan disiplin dan saksi tegas terhadap penyalahgunaan bahu jalan dan trotoar untuk kegiatan usaha; dan
(9) Peningkatan dan perluasan kerjasama dengan Polri dan masyarakat dalam mengatasi gangguan ketertiban, narkoba dan kriminalitas.

4.3.6 Prioritas Pembangunan Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara

Kota Administrasi Utara merupakan wilayah perkotaan yang menjadi simpul penghubung dengan pedagang laut melalui Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Cilincing yang sekaligus menjadi pusat bisnis di Glodok, dan pusat perdagangan ekspor dan impor dengan prasarana dan sarana yang lengkap dan modern. Isu strategis yang dihadapi oleh masyarakat Kota Administrasi Jakarta Utara adalah terjadinya kemacetan parah sebagai akibat penumpukan kendaraan pada pagi hari dan sore hari, banyaknya pengemudi angkutan umum dan pengemudi kendaraan pribadi yang tidak disiplin dan ngetem, dan dampak pembangunan *mass rapid transportation*; masih adanya kawasan kumuh; masih sering terjadinya genangan dan banjir sebagai akibat terbatasnya gorong-gorong; munculnya konflik antarwarga sebagai akibat pergesekan kepentingan; terbatasnya tempat usaha; meningkatnya penggunaan bahu jalan dan trotoar untuk kegiatan usaha; adanya gangguan ketertiban dan kriminalitas.

Prioritas pembangunan Kota Administrasi Jakarta Selatan pada tahun 2016 adalah :

(1) Pengurangan dan penyelesaian kemacetan dengan melakukan rekayasa lalu lintas untuk mengurangi penumpukan kendaraan pada pagi hari dan sore hari terutama di bekas Terminal Lebak Bulus dan Jalan Fatmawati;
(2) Penegakan disiplin dan pemberian sanksi bagi pengemudi angkutan umum yang ngetem dan pengemudi kendaraan pribadi yang tidak disiplin;
(3) Pembangunan perumahan dan permukiman terutama untuk masyarakat yang tinggal di kawasan kumuh;
(4) Pengamanan tempat pembangunan pembangunan *mass rapid transportation*;
(5) Perbaikan selokan dan gorong-gorong yang menyebabkan genangan dan banjir
(6) Perluasan kerjasama Lurah dan Camat dengan masyarakat dan organisasi masyarakat untuk mencegah munculnya konflik antarwarga sebagai akibat pergesekan kepentingan
(7) Pembangunan dan penyediaan tempat usaha bagi pelaku usaha kecil dan menengah;
(8) Penerapan disiplin dan saksi tegas terhadap penyalahgunaan bahu jalan dan trotoar untuk kegiatan usaha; dan
(9) Peningkatan dan perluasan kerjasama dengan Polri dan masyarakat dalam mengatasi gangguan ketertiban dan kriminalitas.

4.4 Keselarasan Prioritas Nasional dengan Program Unggulan dan Proritas Daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2016

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selain berkomitmen dalam memenuhi target pencapaian kinerja pemerintahan daerah, juga turut berupaya dalam mendukung program prioritas nasional guna mewujudkan perencanaan pembangunan yang Selaras dan konsisten antara kebijakan pemerintah pusat dengan Pemerintah Provinsi sehingga dapat dicapai penyelesaian target-target pembangunan nasional dan provinsi.

Selanjutnya dalam upaya mewujudkan prioritas pembangunan untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2013-2017, maka perlu menyusun Kegiatan Unggulan yang akan dilaksanakan pada tahun 2016. Perumusan kegiatan unggulan tahun 2016 ini dilandaskan pada permasalahan yang ada di DKI Jakarta yang belum terselesaikan pada pembangunan tahun 2014 dan 2015 dan memiliki dampak nyata dan langsung bagi keberlanjutan pembangunan.

Penjabaran kegiatan unggulan akan disajikan berdasarkan isu strategis serta keterkaitannya dengna sub prioritas nasional dengan harapan dapat menunjukkan kesungguhan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mendukung prioritas dan sasaran pembangunan nasional sebagaimana disajikan pada Tabel 4.6 berikut.

Tabel 4.7 Sandingan Penjabaran Program Unggulan RKPD 2016

No	PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD TAHUN BERKENAAN	SUB 9 PRIORITAS NASIONAL (NAWA CITA)	SASARAN PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN NASIONAL (NAWA CITA)	PERMASALAHAN DALAM RPJMD	STRATEGI RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PROGRAM UNGGULAN/ PRIORITAS 2016
1.	Pengembangan sistem transportasi	• Membangun Konektivitas Nasional Untuk Mencapai Keseimbangan Pembangunan • Membangun Transportasi Massal Perkotaan • Membangun Infrastruktur/ Prasarana Dasar • Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional	• Pengembangan Kawasan Industri • Pengembangan Kemaritiman	• kapasitas jalan yang sudah tidak mencukupi.	• Pengembangan simpang tak sebidang	• Urusan Pekerjaan Umum : Melaksanakan Pembangunan *flyover* dan *underpass*	• Program Pembangunan/ Peningkatan Jalan dan Jembatan	• Pembangunan Fly Over dan Underpass
					• Pengembangan Prasarana Jalan dan Jembatan	• Urusan Pekerjaan Umum : Pengembangan Jalan Arteri antara lain melalui Pembangunan jalan *missing link*, dan Pengembangan jalur khusus untuk angkutan massal pada jaringan jalan arteri layang	• Program Pembangunan/ Peningkatan Jalan dan Jembatan	• Pembangunan Koridor Busway • Pembangunan jalan tembus, jalan sejajar kali dan jalan sejajar rel
						• Urusan Pekerjaan Umum : Menunjang pengembangan ruas jalan tol dalam kota	• Program Pembangunan/ Peningkatan Jalan dan Jembatan	• Dukungan terhadap sarana prasarana pembangunan 6 ruas jalan tol
				• terbatasnya ketersediaan dan pelayanan angkutan umum	• Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal	• Urusan Perhubungan dan Urusan Pekerjaan Umum : Mengembangkan angkutan massal Berbasis Jalan atau BRT(*Bus Rapid Transit*) melalui pembangunan Koridor Busway baru yaitu Koridor 13 (Ciledug-Blok M),	• Program Pembangunan Angkutan Umum Berbasis Jalan	• Pemberian *Public Service Obligation (PSO)* Busway dan Bus Tingkat Pariwisata

No	PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD TAHUN BERKENAAN	SUB 9 PRIORITAS NASIONAL (NAWA CITA)	SASARAN PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN NASIONAL (NAWA CITA)	PERMASALAHAN DALAM RPJMD	STRATEGI RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PROGRAM UNGGULAN/ PRIORITAS 2016
						Koridor 14 (UI-Manggarai), dan Koridor 15 (Pondok Kelapa – Blok M), Pembangunan Busway koridor Integrasi Jabodetabek; Jakarta-Tangerang, Jakarta-Bekasi, dan Jakarta-Depok/Bogor, Pengembangan layanan Feeder Busway, Penambahan armada Bus Busway dan Bus Feeder Busway serta Peningkatan profesionalisme lembaga pengelola Busway		
						• Urusan Perhubungan dan Urusan Pekerjaan Umum : Membangun Sistem Angkutan Umum Massal berbasis Rel melalui Pembangunan MRT koridor Utara-Selatan tahap I (Lb Bulus - Bunderan HI), Pembangunan sebagian MRT koridor Selatan-Utara tahap II (Bunderan HI - Kampung Bandan), dan Persiapan pembangunan MRT koridor Barat-Timur • Urusan Perhubungan :	• Program Pembangunan Angkutan Massal Berbasis Rel	• Pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) • Pembangunan jaringan Kereta Rel Listrik (ringan)

No	PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD TAHUN BERKENAAN	SUB 9 PRIORITAS NASIONAL (NAWA CITA)	SASARAN PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN NASIONAL (NAWA CITA)	PERMASALAHAN DALAM RPJMD	STRATEGI RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PROGRAM UNGGULAN/ PRIORITAS 2016
						Mengembangkan Light Rapid Transit (LRT) melalui Pembangunan Koridor Green Line dan Blue Line, sesuai RTRW		
						• Urusan Perhubungan : Membangun Sistem Angkutan Umum Massal Laut dan sungai melalui Pembangunan dermaga penyeberangan dari dan ke kepulauan seribu, Pengadaan armada kapal penyeberangan, Standarisasi keamanan dan keselamatan kapal penyebrangan tradisional, pemberdayaan masyarakat untuk mendukung pengembangan sistem angkutan umum massal laut dan sungai	• Program Pembangunan Transportasi Perairan	• Pengembangan Sistem Transportasi Massal Laut di Kep. Seribu
				• sistem dan jaringan multimoda belum terintegrasi.	• Pengembangan sarana dan prasarana pendukung sistem transportasi	• Urusan Perhubungan : Melakukan Pengembangan terminal antara lain melalui Revitalisasi Terminal Bus Dalam Kota • Urusan Perhubungan : Melakukan Pengembangan pelabuhan melalui	• Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	• Revitalisasi terminal • Perbaikan dan Peningkatan Dermaga di Kawasan Kepulauan Seribu • Revitalisasi

No	PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD TAHUN BERKENAAN	SUB 9 PRIORITAS NASIONAL (NAWA CITA)	SASARAN PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN NASIONAL (NAWA CITA)	PERMASALAHAN DALAM RPJMD	STRATEGI RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PROGRAM UNGGULAN/ PRIORITAS 2016
						Pengembangan angkutan penyeberangan kepulauan seribu		Muara Angke
					• Pengendalian dan Keselamatan Transportasi	• Urusan Perhubungan : Menerapkan manajemen / pembatasan lalu lintas antara lain melalui Penerapan Electronic Road Pricing (ERP), teknik-teknik traffic restraint lainnya, dan Pengendalian penggunaan kendaraan pribadi • Urusan Perhubungan : Melakukan kajian menyeluruh penyebab kemacetan untuk pembenahan titik-titik rawan kemacetan	• Program Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan	• Penyusunan Regulasi dan Penerapan ERP • Rekayasa Lalu Lintas untuk moda transportasi
					• Pembangunan Sarana perpindahan moda transportasi yang terintegrasi, aman dan nyaman bagi pejalan kaki dan penyandang	• Urusan Perhubungan : Membangun fasilitas / sarana pejalan kaki dan jalur sepeda terutama pada koridor angkutan umum, jalan utama dan kawasan pemukiman	• Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	• Pengembangan pedestrian di kawasan strategis

No	PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD TAHUN BERKENAAN	SUB 9 PRIORITAS NASIONAL (NAWA CITA)	SASARAN PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN NASIONAL (NAWA CITA)	PERMASALAHAN DALAM RPJMD	STRATEGI RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PROGRAM UNGGULAN/ PRIORITAS 2016
					disabilitas			
					• Penataan sistem perparkiran	• Urusan Perhubungan : Menata parkir off street dan on street • Urusan Perhubungan : Mengembangkan taman dan gedung parkir di pusat-pusat kegiatan	• Program Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan	• Pengembangan kawasan parkir meter • Penertiban Parkir Liar • Pembangunan Gedung Parkir Glodok
2.	Antisipasi Banjir, Rob, Dan Genangan	• Konektivitas Nasional Untuk Mencapai Keseimbangan Pembangunan • Membangun Infrastruktur/Prasarana Dasar • Pelestarian Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana	• Pengembangan Industri/Kawasan Industri • Pengembangan Pariwisata	• tingginya intensitas hujan di wilayah hulu sungai • tingginya intensitas curah hujan di wilayah hilir dengan topografi wilayah rendah • Kapasitas daya tampung sistem tata air (sungai dan saluran, pintu air,	• Pemeliharaan sarana prasarana drainase	• Urusan Pekerjaan Umum : Melaksanakan pembersihan sungai dan saluran	• Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya	• Penanganan Sampah Badan Air

No	PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD TAHUN BERKENAAN	SUB 9 PRIORITAS NASIONAL (NAWA CITA)	SASARAN PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN NASIONAL (NAWA CITA)	PERMASALAHAN DALAM RPJMD	STRATEGI RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PROGRAM UNGGULAN/ PRIORITAS 2016
				polder, situ dan waduk, proteksi air laut) belum optimal.				
				• tingginya intensitas hujan di wilayah hulu sungai • tingginya intensitas curah hujan di wilayah hilir dengan topografi wilayah rendah • Kapasitas daya tampung sistem tata air (sungai dan saluran, pintu air, polder, situ dan waduk, proteksi air laut) belum	• Pengembangan sarana dan prasarana sistem drainase	• Urusan Pekerjaan Umum : Mengembangkan sarana dan prasarana pendukung sistem drainase kota antara lain melalui Peningkatan drainase terutama di pusat kota dan Pengadaan alat berat serta alat angkut.	• Program Pembangunan Prasarana dan Sarana Pengendali Banjir	• pembangunan dan Peningkatan Sistem Pompa Pengendali Banjir
						• Urusan Pekerjaan Umum : Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas sungai dan saluran melalui Normalisasi dan penataan sempadan sungai dan saluran • Urusan Pekerjaan Umum : Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas situ, waduk dan embung melalui Pembebasan,pembangunan dan pemeliharaan situ,waduk dan embung	• Program Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pengendalian Banjir dan Drainase	• Normalisasi sungai, kali dan waduk, termasuk Proyek JUFMP/JEDI

No	PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD TAHUN BERKENAAN	SUB 9 PRIORITAS NASIONAL (NAWA CITA)	SASARAN PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN NASIONAL (NAWA CITA)	PERMASALAHAN DALAM RPJMD	STRATEGI RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PROGRAM UNGGULAN/ PRIORITAS 2016
				optimal.				
				• banjir dan genangan akibat pasang air laut (rob)	• Pengendalian banjir akibat air laut pasang	• Urusan Pekerjaan Umum : Mengoptimalkan upaya adaptasi terhadap air laut pasang melalui Pembangunan tanggul pengaman pantai dan penahan air laut pasang	• Program Pembangunan Prasarana dan Sarana Pengendali Banjir	• Pengembangan tanggul Pantai Fase A mendukung NCICD •
3.	Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Pemukiman Kota	• Pengurangan Ketimpangan Antar Kelompok Ekonomi Masyarakat • Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Marjinal melalui Pelaksanaan Program Indonesia Kerja • Membangun Infrastruktur/Prasarana Dasar	• Pengembangan Industri/Kawasan Industri • Pengembangan Pariwisata	• kebutuhan rumah terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan keluarga baru • keterbatasan lahan di wilayah Jakarta • Terbatasnya penyediaan hunian yang layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan	• Kerjasama dalam penyediaan rumah susun sewa	• Urusan Perumahan Rakyat : Melaksanakan Pembangunan superblok rumah susun sewa murah yang dilengkapi pasar, sarana kesehatan dan sarana khusus bagi masyarakat usia lanjut dan penyandang cacat	• Program Penyediaan Perumahan Rakyat	• Pembangunan hunian vertikal melalui kewajiban/ kontribusi pengembang
					• Rehabilitasi dan perbaikan rumah susun sewa yang dikelola Pemprov DKI Jakarta	• Urusan Perumahan Rakyat : Melaksanakan Perbaikan rumah susun sewa yang dibangun pemerintah pusat untuk diserahkan kepada Pemprov DKI Jakarta	• Program Kebijakan Pengembangan Perumahan	• Penghentian pengambilan air tanah di seluruh Kantor Pemda termasuk kantor Camat, Lurah dan sekolah.
					• Pengembangan rumah susun sewa	• Urusan Perumahan Rakyat : Melaksanakan Pembangunan rumah susun sewa pada lokasi-lokasi strategis dan lahan milik Pemda atau konsolidasi lahan dan	• Program Penyediaan Perumahan Rakyat • Program Peningkatan	• Pembangunan rumah susun sewa yang terpadu (zero waste) dengan fasilitas pasar,

No	PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD TAHUN BERKENAAN	SUB 9 PRIORITAS NASIONAL (NAWA CITA)	SASARAN PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN NASIONAL (NAWA CITA)	PERMASALAHAN DALAM RPJMD	STRATEGI RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PROGRAM UNGGULAN/ PRIORITAS 2016
				masyarakat Jakarta.		bangunan • Melaksanakan pendampingan masyarakat calon penghuni rumah susun	Sarana dan Prasarana Perumahan Rakyat	saluran pipa gas, lokasi binaan dan kesehatan
				• masih terdapatnya permukiman yang kurang sehat dan tertata	• Penataan kawasan permukiman kumuh skala kota	• Urusan Perumahan Rakyat : Menata kampung sepanjang daerah aliran sungai • Urusan Perumahan Rakyat : Menata kampung tematik • Urusan Perumahan Rakyat : Menata RW-RW Kumuh	• Program Peningkatan Kualitas dan Perbaikan Kampung	• Penataan kampung dan lingkungan kumuh
4.	Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	• Pelestarian Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana	• Pengembangan Pariwisata	• Akses akan air bersih bagi seluruh masyarakat belum optimal	• Pengembangan sistem air minum perpipaan	• Urusan Pekerjaan Umum : Mengembangkan sistem penyediaan air minum perpipaan di seluruh DKI Jakarta melalui Peningkatan kualitas dan kuantitas air baku dari Waduk Jatiluhur dan Waduk Karian ke Jakarta, Pengembangan sumber air baku alternatif untuk memenuhi kebutuhan air bersih perpipaan, Pembangunan sarana prasarana penyediaan air bersih perpipaan yang dapat langsung diminum di kawasan tertentu dan pembangunan pipa transmisi	• Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih	• Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), termasuk di Kepulauan Seribu

No	PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD TAHUN BERKENAAN	SUB 9 PRIORITAS NASIONAL (NAWA CITA)	SASARAN PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN NASIONAL (NAWA CITA)	PERMASALAHAN DALAM RPJMD	STRATEGI RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PROGRAM UNGGULAN/ PRIORITAS 2016
						air minum dari perbatasan Bekasi ke Muara Karang		
				• meningkatnya produksi sampah kota, • sistem pengelolaan sampah yang belum terpadu, • terbatasnya penyediaan tempat pemrosesan akhir	• Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan	• Urusan Pekerjaan Umum : Meningkatkan kerjasama dengan swasta dalam pelayanan persampahan melalui swastanisasi kebersihan, dan kerjasama pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan ITF dan TPST • Urusan Pekerjaan Umum : Memperluas tanggung jawab stakeholder antara lain melalui Penggalangan dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) untuk pengelolaan persampahan	• Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan	• Penegakan Hukum Bidang Kebersihan
					• Penerapan Konsep 3R	• Urusan pekerjaan Umum : Memanfaatkan sampah sebagai sumber daya mulai dari sumber/hulu melalui Pembangunan sentra 3R / Pusat Daur Ulang, Pendampingan pembentukan bank sampah di tingkat kelurahan, dan Pengembangan jejaring kerja bank sampah	• Program Pengurangan Timbulan Sampah di Sumber	• Pembangunan TPS Ramah Lingkungan

No	PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD TAHUN BERKENAAN	SUB 9 PRIORITAS NASIONAL (NAWA CITA)	SASARAN PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN NASIONAL (NAWA CITA)	PERMASALAHAN DALAM RPJMD	STRATEGI RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PROGRAM UNGGULAN/ PRIORITAS 2016
					• Pengembangan pengelolaan air limbah domestik sistem terpusat	• Urusan Pekerjaan Umum : Mendorong pengolahan air limbah domestik permukiman antara lain melalui Pembangunan IPAL Komunal, Sosialisasi penggunaan septic tank standar lingkungan hidup, dan Pembangunan/Peningkatan IPAL sistem setempat	• Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Limbah	• Pengembangan sistem pengolahan air limbah
5.	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas RTH	• Pelestarian Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana	• Pengembangan Pariwisata	• terbatasnya jumlah lahan yang dapat dimanfaatkan untuk ruang terbuka hijau. • belum meratanya penyebaran RTH secara proporsional di wilayah DKI Jakarta	• Peningkatan ruang terbuka hijau publik dan privat	• Urusan Lingkungan Hidup : Menambah RTH Publik melalui penyediaan dan pembelian lahan baru dan penggalangan peran swasta dalam penyediaan RTH Publik • Urusan Lingkungan Hidup : Pengembangan RTH privat antara lain melalui Penerapan regulasi untuk penambahan RTH Privat, penyediaan lahan minimal untuk hutan kota dan sentra pengembangan tanaman pangan dan hortikultura serta peningkatan konservasi flora dan fauna	• Program Pemberdayaan dan Penggalangan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Pertamanan dan Pemakaman	• Penambahan RTH melalui pembelian lahan dan kontribusi pengembang • Penggalangan peran swasta dan masyarakat dalam penyediaan dan pemeliharaan RTH Publik/penghijauan lingkungan

No	PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD TAHUN BERKENAAN	SUB 9 PRIORITAS NASIONAL (NAWA CITA)	SASARAN PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN NASIONAL (NAWA CITA)	PERMASALAHAN DALAM RPJMD	STRATEGI RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PROGRAM UNGGULAN/ PRIORITAS 2016
					• Peningkatan kualitas taman sebagai ruang publik	• Urusan Lingkungan Hidup : Membangun dan mengembangkan taman, taman interaktif dan hutan kota sebagai ruang publik yang dapat dijadikan sarana rekreasi budaya betawi, sarana penyaluran kreativitas atau creative public space serta berfungsi sebagai daerah resapan air	• Program Peningkatan Kuantitas RTH Pertamanan dan Pemakaman	• Pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) • Pengembangan kawasan hijau dan taman interaktif
6.	Pengurangan Ketimpangan Ekonomi dan Perluasan Kesempatan Kerja	• Pengurangan Ketimpangan Antar Kelompok Ekonomi Masyarakat • Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Marjinal melalui Pelaksanaan Program Indonesia Kerja • Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja	• Pengembangan Industri/Kawasan Industri • Kedaulatan Pangan	• Masih terdapatnya ketimpangan ekonomi dan kemiskinan perkotaan • Masih diperlukannya upaya – upaya untuk menjamin pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	• Penyediaan ruang bagi sektor informal pada kawasan perkantoran dan perdagangan	• Urusan Penataan Ruang dan Urusan Koperasi dan UKM : Mengefektifkan aturan penyediaan ruang bagi ekonomi informal pada kawasan perkantoran dan perdagangan serta memberikan pinjaman modal bergulir	• Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Koperasi dan UMKM	• Penataan dan Relokasi PKL pada kawasan perkantoran • Pembebasan lahan untuk PKL
					• Revitalisasi pasar tradisional dengan tidak menggusur PKL	• Urusan Perdagangan : Memperbaiki pasar-pasar tradisional dan menyediakan ruang bagi pedagang kaki lima	• Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Koperasi dan UMKM	• Revitalisasi Pasar Tradisional • Penataan Kawasan dan Revitalisasi Pasar Tanah Abang Blok G Terintegrasi

No	PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD TAHUN BERKENAAN	SUB 9 PRIORITAS NASIONAL (NAWA CITA)	SASARAN PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN NASIONAL (NAWA CITA)	PERMASALAHAN DALAM RPJMD	STRATEGI RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PROGRAM UNGGULAN/ PRIORITAS 2016
								dengan Stasiun Tanah Abang
					• Peningkatan keterampilan dan kualitas tenaga kerja	• Urusan Ketenagakerjaan : Meningkatkan kurikulum pelatihan keterampilan di Balai Latihan Kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja • Urusan Ketenaga Kerjaan : Meningkatkan sarana dan prasarana Balai Latihan Kerja	• Program Penguatan sistem dan fasilitas pendukung pusat pelatihan kerja	• Pelaksanaan sertifikasi dan uji kompetensi Tenaga kerja
7.	Isu Pembangunan Budaya Multi-Kultur	• Peningkatan pemahaman mengenai pluralitas sosial dan keberagaman budaya dalam masyarakat. • Pembangunan kembali modal sosial dalam rangka memperkukuh karakter dan jati diri bangsa. • Meningkatnya promosi dan	• Pengembangan Pariwisata	• Keragaman sosial dan budaya masyarakat Jakarta selain sebagai potensi pembangunan, juga sebagai faktor pendorong terjadinya konflik sosial. • fanatisme berlebihan dari suatu	• Pengembangan Jakarta sebagai pusat kebudayaan nasional	• Urusan Kebudayaan : Menyelenggarakan event budaya nasional dan daerah antara lain melalui kerjasama dengan daerah lain dalam pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana untuk peningkatan budaya nusantara	• Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan	• Pembangunan Masjid Raya Jakarta

No	PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD TAHUN BERKENAAN	SUB 9 PRIORITAS NASIONAL (NAWA CITA)	SASARAN PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN NASIONAL (NAWA CITA)	PERMASALAHAN DALAM RPJMD	STRATEGI RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PROGRAM UNGGULAN/ PRIORITAS 2016
		diplomasi kebudayaan		kelompok masyarakat.				
				• Diperlukannya pelestarian budaya Jakarta	• Pengembangan budaya Betawi yang bersinergi dengan budaya multikultur lainnya	• Urusan Kebudayaan : Melakukan pembinaan budaya betawi dan budaya multikultur lainnya melalui peningkatan dan fasilitasi alkulturasi budaya nusantara dan budaya betawi	• Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan	• Pengembangan Perkampungan Budaya Betawi
					• Penyelenggaraan event-event kebudayaan	• Urusan Kebudayaan : Menyelenggarakan karnaval dan festival budaya di lima wilayah • Urusan Kebudayaan : Menyelenggarakan event-event budaya betawi secara reguler	• Program Pengembangan Promosi dan Informasi Kebudayaan	• Penyelenggaraan event/festival Pariwisata Budaya Jakarta • Pengembangan Jakarta sebagai destinasi Wisata Niaga, Bahari, Olah Raga dan MICE
					• Revitalisasi kawasan Kota Tua Jakarta	• Urusan Kebudayaan : Menata fisik lingkungan kawasan Kota Tua Jakarta melalui pembangunan sarana dan prasarana ekonomi kreatif • Urusan Kebudayaan : Melakukan kerjasama dengan pemilik	• Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan	• Revitalisasi Kawasan Kota Tua menuju World Heritage Site • Revitalisasi Museum

No	PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD TAHUN BERKENAAN	SUB 9 PRIORITAS NASIONAL (NAWA CITA)	SASARAN PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN NASIONAL (NAWA CITA)	PERMASALAHAN DALAM RPJMD	STRATEGI RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PROGRAM UNGGULAN/ PRIORITAS 2016
						bangunan/gedung dan memberdayakan masyarakat untuk pelestarian dan pengembangan kota tua sebagai destinasi wisata dan benda cagar budaya		
		• Peningkatan kualitas pendidikan karakter untuk membina budi pekerti, membangun watak, dan mengembangkan kepribadian.	• Revolusi Mental	• Peran olahraga yang masih perlu ditingkatkan dalam pembangunan kualitas kehidupan masyarakat	• Pengembangan sarana dan prasarana OR di seluruh wilayah	• Urusan Olahraga dan Pemuda : Meningkatkan sarana dan prasarana olahraga dan pemuda melalui Penambahan jumlah dan peningkatan fungsi Gelanggang Remaja sebagai sarana untuk aktualisasi aktivitas seni-budaya pelajar,remaja dan mahasiswa dan Penambahan jumlah dan peningkatan fungsi Gelanggang Olahraga sebagai media pengembangan dan pembinaan olahraga	• Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga dan Pemuda	• Pengembangan sarana olahraga
8.	Peningkatan Pelayanan Publik	• Membangun transparansi dan akuntabiltas kinerja pemerintahan	• Revolusi Mental	• Perlunya penerapan reformasi birokrasi menyangkut perubahan sikap dan	• Pengembangan sistem reward and punishment dalam pengembangan SDM.	• Urusan Otonomi Daerah : menerapkan sistem reward and punishment yang adil dan sesuai dengan karakteristik organisasi	• Program Peningkatan Disiplin dan Kinerja Aparatur DKI Jakarta	• Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun

No	PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD TAHUN BERKENAAN	SUB 9 PRIORITAS NASIONAL (NAWA CITA)	SASARAN PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN NASIONAL (NAWA CITA)	PERMASALAHAN DALAM RPJMD	STRATEGI RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PROGRAM UNGGULAN/ PRIORITAS 2016
		• Penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi nasional (RBN) • Meningkatkan Partisipasi Publik dalam Proses Pengambilan Kebijakan Publik dengan meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik •		tingkah laku (mind set) aparat pemerintahan. • Perlunya penataan kelembagaan yang efektif, efisien dan transparan.				2016
					• Proses pengisian jabatan secara terbuka	• Urusan Otonomi Daerah : Melaksanakan Lelang Jabatan	• Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur DKI Jakarta	• Pelaksanaan Lelang Jabatan/seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi
				• Perlunya Sinergisitas antar lembaga pemerintah dan pemerintah dengan swasta dan masyarakat.	• Pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel	• Urusan Otonomi Daerah : Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk pelayanan dan pemungutan Pajak Daerah melalui Penerapan online sistem pajak daerah	• Program Sistem Informasi danTeknologi Pajak Daerah	• Penerapan sistem Online pada Pajak Daerah
					• Pengembangan mekanisme pengaduan berbasis sistem informasi yang real-time	• Urusan Otonomi Daerah : Menyediakan kemudahan akses informasi kepada masyarakat • Urusan Otonomi Daerah : penyediaan saluran pengaduan melalui berbagai alat dan media	• Program Komunikasi, Data dan Informasi Publik	• Penyelenggaraan Respon Opini Publik

No	PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD TAHUN BERKENAAN	SUB 9 PRIORITAS NASIONAL (NAWA CITA)	SASARAN PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN NASIONAL (NAWA CITA)	PERMASALAHAN DALAM RPJMD	STRATEGI RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PROGRAM UNGGULAN/ PRIORITAS 2016
					• Pengembangan sistem informasi dalam mendukung pelayanan publik yang lebih baik	• Urusan Penanaman Modal : Membangun jaringan komunikasi perjinan investasi secara online • Urusan Otonomi Daerah : Menyederhanakan jalur birokrasi perijinan dengan meningkatkan penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) • Urusan Otonomi Daerah : Menerapkan sistem informasi pelayanan publik	• Program Komunikasi, Data dan Informasi Publik	• Pengembangan layanan perijinan secara online • Peningkatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
9.	Peningkatan Kualitas Pendidikan	• Pendidikan khususnya Pelaksanaan Program Indonesia Pintar	• Revolusi Mental	• Masih banyaknya prasarana dan sarana pendidikan dasar yang perlu diperbaiki	• Peningkatan akses pelayanan pendidikan bagi seluruh golongan masyarakat menuju JAKARTA PINTAR	• Urusan Pendidikan : Meningkatkan sekolah yang berfungsi dengan baik	• Program Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan	• Peningkatan Kualitas Gedung Sekolah
				• Perlunya peningkatan proses belajar mengajar agar lulusan dapat lebih	• Peningkatan kualitas layanan pendidikan	• Urusan Pendidikan : Meningkatkan kualitas dan kuantitas Guru • Urusan Pendidikan : Meningkatkan kualitas lulusan peserta didik melalui Penyebaran sekolah-sekolah	• Program Peningkatan Mutu Pendidikan	• Peningkatan Kualitas Manajemen Sekolah • Peningkatan Kualitas Pendidikan anak

No	PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD TAHUN BERKENAAN	SUB 9 PRIORITAS NASIONAL (NAWA CITA)	SASARAN PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN NASIONAL (NAWA CITA)	PERMASALAHAN DALAM RPJMD	STRATEGI RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PROGRAM UNGGULAN/ PRIORITAS 2016
				berkualitas. • masih terjadi tawuran antar pelajar		unggulan ke seluruh wilayah, dan melalui Penyempurnaan sistem rayonisasi dan peningkatan karakter bagi kualitas didik		Usia Dini, Non Formal, dan Informal
				• perlunya peningkatan akses pendidikan untuk semua lapisan masyarakat	• Peningkatan akses pelayanan pendidikan bagi seluruh golongan masyarakat menuju JAKARTA PINTAR	• Urusan Pendidikan : Melaksanakan Wajib Belajar 12 Tahun yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat melalui Pemberian Biaya Operasional Pendidikan (BOP) dan Biaya Operasional Buku (BOB) bagi peserta didik di sekolah negeri dan Swasta serta pemberian biaya personal Siswa Miskin (BPSM) dengan KARTU JAKARTA PINTAR • Urusan Pendidikan : Meningkatkan Pemenuhan Hak-hak Anak di Sekolah • Urusan Pendidikan : Meningkatkan daya tampung peserta didik	• Program Wajib Belajar Dua BelasTahun	• Penerapan KARTU JAKARTA PINTAR • Peningkatan Daya Tampung Peserta Didik • Peningkatan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK)
10.	Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat	• Pembangunan Kesehatan khususnya Pelaksanaan Program	• Revolusi Mental	• belum optimalnya pelaksanaan sistem pelayanan	• Peningkatan akses pelayanan kesehatan bagi seluruh penduduk DKI	• Urusah Kesehatan : Menerapkan sistem jaminan pembiayaan menyeluruh (total coverage) bagi masyarakat melalui	• Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah	• Penerapan KARTU JAKARTA SEHAT • Pelayanan kesehatan

No	PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD TAHUN BERKENAAN	SUB 9 PRIORITAS NASIONAL (NAWA CITA)	SASARAN PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN NASIONAL (NAWA CITA)	PERMASALAHAN DALAM RPJMD	STRATEGI RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PROGRAM UNGGULAN/ PRIORITAS 2016
		Indonesia Sehat		kesehatan. • Masih tingginya angka kesakitan penyakit menular dan tidak menular. • rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan lingkungan.	Jakarta	Penerapan pelayanan kesehatan gratis bagi seluruh warga miskin dan rentan Jakarta dengan KARTU JAKARTA SEHAT • Urusan Kesehatan : Menyelenggarakan pelayanan kesehatan Masyarakat di pasar-pasar tradisional dan rumah susun • Urusan Kesehatan : Membentuk dan mengembangkan Kelurahan siaga aktif • Urusan Kesehatan : Menerapkan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) di kelurahan • Urusan Kesehatan : Meningkatkan cakupan akses layanan kesehatan pada ODHA (Orang Dengan HIV/AIDS)		Masyarakat di pasar-pasar tradisional/rumah susun • Penerapan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di Kelurahan • Pencegahan dan penanggulangan HIV AIDS.
				• Perlunya peningkatan kualitas pelayanan pada rumah sakit dan	• Peningkatan akses pelayanan kesehatan bagi seluruh penduduk DKI Jakarta	• Urusan Kesehatan : Mengembangkan Puskesmas Rawat Inap • Urusan Kesehatan : Menambah kapasitas tempat tidur Kelas Tiga pada RSUD	• Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan	• peningkatan Puskesmas kecamatan menjadi RSUD tipe D di setiap Kecamatan

No	PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD TAHUN BERKENAAN	SUB 9 PRIORITAS NASIONAL (NAWA CITA)	SASARAN PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN NASIONAL (NAWA CITA)	PERMASALAHAN DALAM RPJMD	STRATEGI RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PROGRAM UNGGULAN/ PRIORITAS 2016
				puskesmas.				• Pembangunan RSUD Khusus Kanker
11	Penguatan Ketahanan Pangan	• Peningkatan Kedaulatan Pangan	• Kedaulatan Pangan	• Provinsi DKI Jakarta bukan merupakan daerah lumbung pangan, sehingga sangat bergantung pada pasokan pangan daerah sekitarnya.	• Optimalisasi distribusi komoditas dan kebutuhan pokok menghadapi ketatnya persaingan pasar	• Urusan Penataan Ruang, Urusan Ketahanan Pangan, Urusan Perdagangan dan Urusan Penanaman Modal : Menyediakan stok komoditas dan kebutuhan pokok	• Program pengamanan ketersediaan pangan, pengendalian Akses, Harga, Promosi, dan Distribusi/Pemasaran	• Pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah Dalam Rangka Peningkatan Ketahanan Pangan DKI Jakarta • Pengembangan Sistem Logistik Terpadu
12	Pembangunan Energi dan Telematika Jakarta	• Kedaulatan Energi	• Kedaulatan Energi	• Kebutuhan energi listrik di DKI Jakarta masih sangat bergantung pasokan pembangkit di Muara Karang.	• Pengelolaan energi ramah lingkungan dan suplai bahan bakar minyak dan gas yang efektif dan efisien	• Urusan Penataan Ruang dan Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral : Melakukan kerjasama dengan Perusahaan Gas Negara untuk mengembangkan jaringan pipa gas bawah tanah di kawasan Industri, permukiman, Perkantoran, Perdagangan, dan Jasa	• Program Pembinaan dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	• Pembangunan Power Plant • Pengembangan konversi BBM ke BBG • Penyediaan bahan bakar gas untuk transportasi/ permukiman

No	PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD TAHUN BERKENAAN	SUB 9 PRIORITAS NASIONAL (NAWA CITA)	SASARAN PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN NASIONAL (NAWA CITA)	PERMASALAHAN DALAM RPJMD	STRATEGI RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PROGRAM UNGGULAN/ PRIORITAS 2016
				• belum ada penambahan pasokan dari sistem pembangkit baru.		• Urusan Energi dan Sumberdaya mineral : Membangun Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG)		
					• penataan jaringan utilitas perkotaan	• Urusan Pekerjaan umum : Penataan dan pembangunan jaringan ducting utilitas	• Program Pembinaan dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	• Pembangunan/ Peningkatan Kualitas Pencahayaan Kota dan Kawasan Perkampungan • Peningkatan Sistem Kelistrikan di Kepulauan Seribu
				• Jakarta ke depan dituntut untuk menjadi kota internasional yang kompetitif. • Perlunya Penggunaan telematika sebagai tulang	• Pengembangan sistem dan jaringan telekomunikasi pada kantor pemerintahan, pusat pelayanan publik dan tempat umum	• Urusan Penataan Ruang, Urusan Komunikasi dan Informatika dan Urusan Pekerjaan Umum : Mengintegrasikan jaringan serat optik dengan utilitas lain dan penyediaan fasilitas jaringan wifi di tempat-tempat umum dan di kantor-kantor pemerintahan serta Penataan dan pengelolaan Data Center dan *Disaster Recovery Center* (DRC)	• Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	• Pengelolaan dan Pengembangan Jakarta *Smart City*

No	PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD TAHUN BERKENAAN	SUB 9 PRIORITAS NASIONAL (NAWA CITA)	SASARAN PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN NASIONAL (NAWA CITA)	PERMASALAHAN DALAM RPJMD	STRATEGI RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PROGRAM UNGGULAN/ PRIORITAS 2016
				punggung pembangunan Jakarta menjadi kota pintar				

Adapun program unggulan dan prioritas pada tahun 2016 beserta prakiraan maju tahun 2017 sebagaimana tercantum pada RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013 - 2017 dapat dilihat pada Tabel 4.7 berikut: